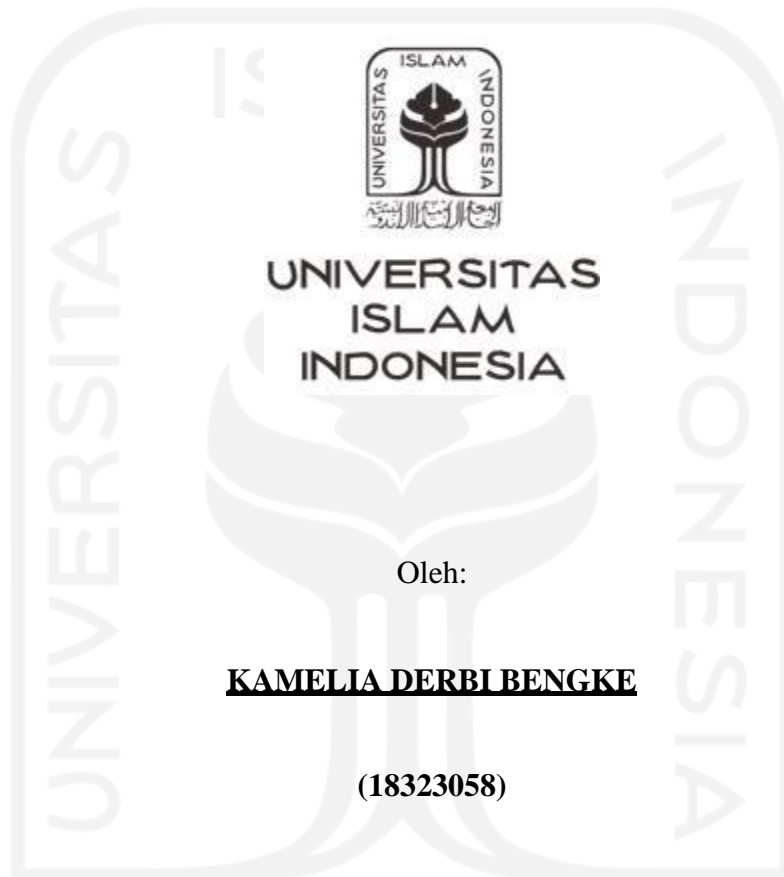


**UPAYA PEMBENTUKKAN POLITIK IDENTITAS TERHADAP
MASYARAKAT UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI



Oleh:

KAMELIA DERBI BENGKE

(18323058)



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**UPAYA PEMBENTUKKAN POLITIK IDENTITAS TERHADAP
MASYARAKAT UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

KAMELIA DERBI BENGKE

(18323058)

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEMBENTUKKAN POLITIK IDENTITAS TERHADAP
MASYARAKAT UIGHUR DI XINJIANG PADA TAHUN 2014-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 Agustus 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.

2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan dan termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta,



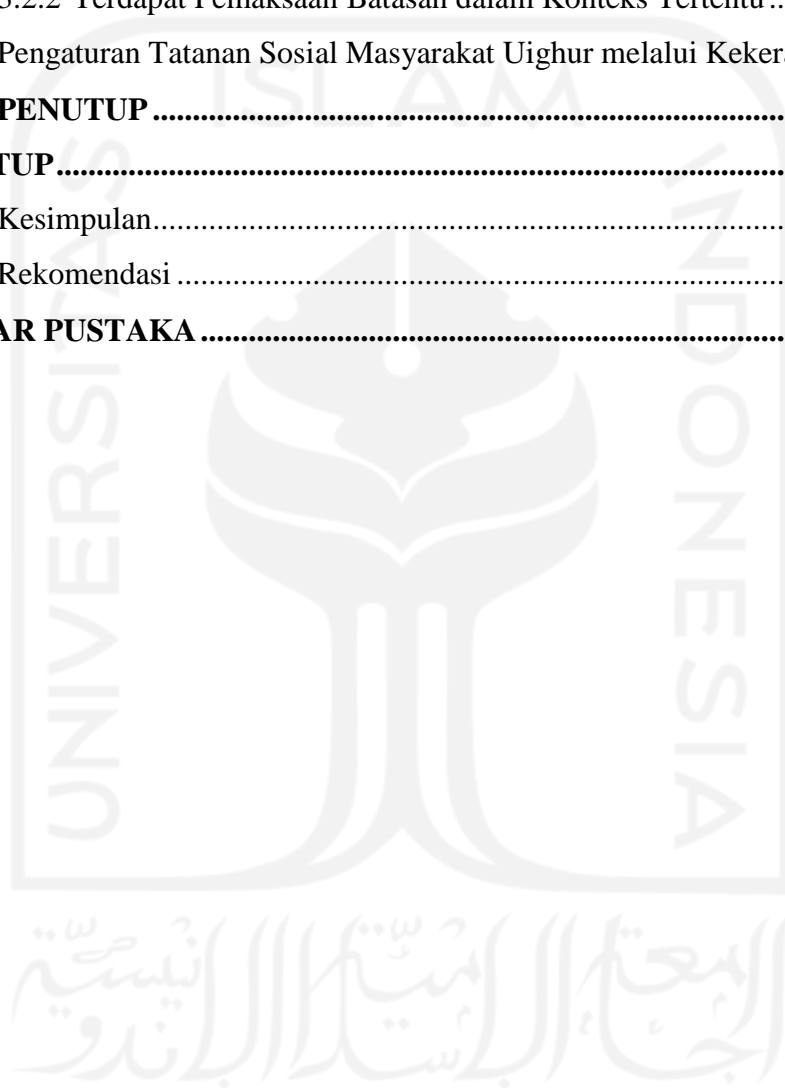
METERAI
5000
BEKRAF 100783

Kamelia Derbi Bengke

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	18
1.7 Argumen Sementara	Error! Bookmark not defined.
1.8 Metode Penelitian.....	20
1.8.1 Jenis Penelitian	20
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	21
1.8.3 Metode Pengambilan Data.....	21
1.8.4 Proses Penelitian	21
1.9 Sistematika Pembahasan	23
BAB 2 UIGHUR DAN KEBIJAKAN NASIONALISME TIONGKOK	26
2.1 Posisi Uighur terhadap Tiongkok.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Sejarah Hubungan Tiongkok dan Uighur	26
2.1.2 Masyarakat Uighur	31
2.1.3 Dinamika Ekonomi dan Sosial di Xinjiang	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.2 Penguatan Nasionalisme Tiongkok.....	37
2.3 Penolakan Terhadap Nasionalisme Tiongkok.....	40

BAB 3 UPAYA PENYERAGAMAN IDENTITAS NASIONALISME TIONGKOK DI XINJIANG 2014 – 2019	45
3.1 Pengaruh Modernisasi terhadap Identitas Masyarakat Uighur.....	51
3.2 Peran Lembaga Kognisi dalam Penyeragaman Identitas Masyarakat Uighur	56
3.2.1 Terciptanya Aturan Pokok Dan Interpretasi	57
3.2.2 Terdapat Pemaksaan Batasan dalam Konteks Tertentu	61
3.3 Pengaturan Tatanan Sosial Masyarakat Uighur melalui Kekerasan.....	63
BAB 4 PENUTUP	70
PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar

Gambar 1.1 *Speed of Ethnic Identity Change*..... 18

Gambar 2.2 *Ethnic Minority Populations Grew*..... 18



DAFTAR SINGKATAN

- CNPC : *China National Petroleum Corporation*
- ETIM : *East Turkestan Islamic Movement*
- HAM : Hak Asasi Manusia
- IJOP : Platform Operasi Gabungan Terpadu
- ICCPR: *International Covenant on Civil and Political Right*
- PDB : Produk Domestik Bruto
- PLA : *People's Liberation Army*
- SCO : *Shanghai Cooperation Organization*
- SDA : Sumber Daya Alam
- WUC : *World Uyghur Congress*

ABSTRAK

Polemik yang terjadi antar masyarakat Uighur dan Pemerintah Tiongkok, tidak kunjung usai, gerakan separatisme yang terus terjadi serta pemberontakan lainnya, telah mengancam keamanan sosial dan juga ekonomi di Tiongkok. Salah satu alasan terjadinya hal tersebut, yakni masyarakat Uighur yang ingin berpisah dari negara Tiongkok, sehingga membuat pemerintah Tiongkok bergerak, untuk melakukan antisipasi. Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal tersebut yakni, pemerintah Tiongkok melakukan upaya penyeragaman identitas dan nasionalisme di Xinjiang. Hal ini dilakukan sebab terdapat perbedaan budaya serta karakteristik yang mencolok antara masyarakat Uighur dan mayoritas masyarakat Tiongkok. Dengan adanya latar belakang tersebut, pemerintah Tiongkok kemudian mengambil tindakan dengan cara, menerapkan aturan-aturan tegas yang bertujuan untuk mengatur tatanan sosial di Xinjiang, serta untuk membentuk identitas dan perasaan nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakat Uighur. Adapun beberapa kebijakan tersebut, yakni Pengawasan Massal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang. Untuk menganalisis upaya pemerintah Tiongkok dalam penyeragaman identitas di Xinjiang, teori yang digunakan yakni Konstruktivisme Politik Identitas oleh Kanchan Chandra. Teori ini menekankan pada bagaimana proses pembentukan identitas terjadi melalui sebuah upaya yang di ciptakan, bukan terjadi begitu saja, sehingga proses tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara, yakni melalui Modernisasi, Lembaga/Kognisi, Kekerasan, Perlindungan dan Hibriditas.

Kata Kunci: Penyeragaman identitas di Xinjiang, Nasionalisme Tiongkok

ABSTRACT

The ongoing polemics between the Uighurs and the Chinese government, the ongoing separatist movements and other rebellions, have threatened social and economic security in China. One of the reasons for this, namely the Uighurs who want to separate from China, thus making the Chinese government move, to anticipate. One of the efforts to anticipate this is that the Chinese government is making efforts to homogenize identity and nationalism in Xinjiang. This is done because there are cultural differences and striking characteristics between the Uighur community and the majority of Chinese society. With this background, the Chinese government then took action by implementing strict rules aimed at regulating the social order in Xinjiang, as well as to form a strong identity and feeling of nationalism among the Uighur people. Some of these policies are Mass Surveillance, Advocacy Camps, Language Planning and Xinjiang Classes. The theory used is Identity Political Constructivism by Kanchan Chandra. This theory emphasizes how the process of identity formation occurs through an effort that is created, not just happens, so that the process can be carried out in several ways, namely through Modernization, Institutions/Cognition, Violence, Protection and Hybridity.

Keywords: Uniform identity in Xinjiang, Chinese nationalism.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan isu terkait permasalahan Uighur menjadi pemberitaan yang hangat di kalangan dunia internasional. Isu tersebut yakni dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Adanya penahanan dan pemaksaan ideologi secara paksa, memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Xinjiang. Pemberitaan media internasional menyoroti tindakan keras otoritas pemerintah Tiongkok seperti pelarangan praktik keagamaan di Xinjiang serta masjid-masjid yang dijaga oleh tentara. Hal ini merupakan tindak diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di Xinjiang, sebab adanya perbedaan budaya dan kebiasaan yang dimiliki (Dewi 2021). Tindakan pemerintah Tiongkok kemudian tidak hanya berlaku pada masyarakat Uighur, namun juga etnis minoritas lainnya, yakni Tibet. Kedua etnis ini mendapat pengawasan yang ketat dan perlakuan yang sama, sebab memiliki sejarah perjuangan untuk memerdekakan diri dari Tiongkok sehingga terdapat tumpang tindih persepsi dari pemberitaan internasional atas tindakan dari pemerintah Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat Uighur (Kebijakan Politik Minoritas Islam di Tiongkok (Bagian 1) 2017).

Uighur menjadi salah satu etnis Muslim yang mendiami satu daerah di Tiongkok yang bernama Turkestan Timur, namun sekarang adalah Xinjiang. Xinjiang berada dibawah kepemimpinan yang berganti-ganti. Pada abad ke 8 sampai 9 dipimpin oleh Kekaisaran Uighur Khaganate. Masyarakat Uighur dahulu

menyebut dirinya dengan sebutan ‘Orang-orang Turk’ kemudian pada tahun 1847 diambil alih oleh kepemimpinan Tiongkok dan diubah namanya menjadi Xinjiang, yang artinya ‘Batas Baru’. Bangsa Uighur sejak masuk ke dalam wilayah Xinjiang mulai merasakan diskriminasi, baik disebabkan oleh agama serta bentuk fisik mereka yang berbeda dari kebanyakan suku Han. Rata-rata suku Han beragama Budha dan mempunyai fisik kulit putih dan mata sipit, sedangkan perawakan dari etnis Uighur sendiri lebih condong pada bentuk fisik orang Eurasia dan sebagian lainnya mirip orang Eropa. Hal ini kemudian menjadi salah satu perbedaan yang menyebabkan adanya rasisme dan diskriminasi terhadap mereka (CNN 2018).

Untuk menangani dampak dari kesenjangan sosial tersebut, pemerintah Tiongkok kemudian menjamin kesetaraan sosial yang tertuang dalam konstitusi China, tepatnya pada Pasal 4 tentang “*Nationalities, Minorities, Regions, Languages*” dan Pasal 36 tentang “*Freedom of Religious Belief*” yang menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki aturan yang tertulis terkait pengambilan kebijakan terhadap masyarakat Uighur. Disisi lain, Tiongkok sudah meratifikasi dan berpartisipasi dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* pada tahun 1998 (*United Nations Treaty Collections, 1966*) dan *International Human Rights*. Adanya perjanjian tersebut, memberikan tanggung jawab secara langsung kepada Tiongkok untuk memperhatikan seluruh lapisan masyarakat yang berdiam di berbagai penjuru negaranya. Tiongkok sebagai negara yang besar, tentu saja memiliki jumlah populasi yang banyak. Mao-Zedong sebagai pemimpin yang paling berpengaruh pada saat itu, percaya bahwa adanya penduduk yang besar merupakan aset bagi Negara (Husnah 2016, 146-150).

Penduduk yang besar dalam suatu negara, tentunya juga memiliki perbedaan pemikiran dan kebiasaan. Maka dari itu, Tiongkok perlu mempertahankan identitas negara dengan mengatur pola interaksi dari setiap warga negaranya. Tindakan Tiongkok yang tetap menegakkan aturan tersebut terlepas dari ratifikasi dan partisipasi Tiongkok dalam *ICCPR* merupakan suatu tindakan yang kontradiktif dengan pemberitaan yang beredar di dunia internasional, bahwa adanya tindakan pelanggaran HAM dan perlakuan kejam lainnya terhadap masyarakat Uighur oleh otoritas pemerintahan Tiongkok.

Pembentukan identitas nasional menjadi sangat penting bagi Tiongkok. Sebab, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia. Adanya identitas nasional akan mencerminkan sebuah keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter bangsa tersebut (Antari,2019).Tiongkok sebagai negara yang memiliki beragam etnis, membutuhkan satu identitas yang sama untuk membentuk nasionalisme yang kuat. Hal tersebut dilakukan dengan membentuk politik identitas. Politik identitas adalah sebuah tindakan untuk mengedepankan kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas kemudian juga terdapat tindakan politis dengan upaya mempengaruhi kebijakan penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang berharga (Kambo,2021).Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok harus sigap mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Adanya perbedaan identitas dikalangan masyarakat Uighur menimbulkan upaya pemisahan diri yakni dengan cara melakukan beberapa gerakan ekstrim seperti pemberontakan, pengeboman dan tindak kekerasan lainnya. Maka dari itu, untuk mewujudkan identitas nasional,

perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok melalui proses pembentukan nilai-nilai dalam suatu etnis melalui politik identitas.

Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok perlu mengupayakan penyeragaman identitas tersebut dengan cara yang efektif. Perbedaan yang terdapat dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan kesenjangan baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Tidak jarang juga akan menimbulkan sebuah diskriminasi, seperti yang terjadi pada masyarakat Uighur yang cenderung berbeda dalam hal etnisitas. Penyeragaman identitas dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, sebab setiap etnis memiliki ciri khas yang beragam. Maka dari itu, untuk membentuk kehidupan sosial masyarakat Uighur, pemerintah Tiongkok melakukan tindakan tegas berupa kebijakan seperti Pengawasan Massal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang.

Dalam penelitian ini, penulis membahas topik terkait upaya penyeragaman identitas yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Terutama penyeragaman identitas antara Han dan Uighur. Bentuk penyeragaman identitas yang coba dibangun kepada masyarakat Uighur, akan berdampak pada tatanan sosial dan juga ekonomi di Tiongkok. Selain itu, dengan adanya identitas yang sama antar seluruh masyarakat Tiongkok, maka pemerintah Tiongkok akan dengan mudah mengatur negaranya. Pemerintah Tiongkok juga akan mewujudkan negara yang besar di mata dunia dengan nasionalisme yang kuat. Hal ini tentu saja akan mensejahterakan seluruh masyarakat Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana upaya penyeragaman identitas dan penguatan nasionalisme Tiongkok terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang pada tahun 2014-2019”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui proses penyeragaman identitas dan nasionalisme Tiongkok terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada isu Uighur, sebab penulis mempertimbangkan bahwa permasalahan Uighur ini telah menjadi isu internasional, dan merupakan kasus yang penting untuk dibahas, serta adanya tumpang tindih pandangan terhadap permasalahan yang ada di daerah Xinjiang tersebut. Kemudian, penelitian ini lebih lanjut akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang sebagai upaya penyeragaman identitas. Sehingga penulis mengambil jangka waktu pada tahun 2014 sampai 2019. Alasan penulis mengambil jangka waktu tersebut sebab, menurut penulis pada tahun 2014 menjadi puncak permasalahan di Uighur, karena mulai dioperasikannya kamp-kamp “pendidikan advokasi” yang dianggap oleh beberapa negara sebagai tempat pendiskriminasian masyarakat Uighur (Muslim Uighur: China sebut jutaan warga Xinjiang ikut program "pendidikan vokasi", AS samakan dengan kamp konsentrasi 2020). Selain pembangunan Kamp Advokasi, terdapat beberapa kebijakan lainnya yakni Pengawasan Massal, Perencanaan bahasa dan Kelas Xinjiang. Kemudian penulis mengambil akhir cakupan waktu pada penelitian ini, yakni pada tahun 2019.

Sebab pada 2019 terdapat pertumbuhan populasi yang menurun di Xinjiang yakni, sekitar 84%. Hal ini merupakan dampak dari sebuah kampanye yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengatur tatanan sosial di Xinjiang. Hal ini juga dipengaruhi oleh empat kebijakan diatas, terutama pada pembangunan kamp advokasi, yang diduga banyak menahan masyarakat Uighur. Tidak hanya itu, dugaan akan adanya indoktrinasi, penahanan diluar hukum, penghancuran kebudayaan serta bentuk kekerasan lainnya menjadi penyebab penurunan populasi di Xinjiang (News 2020).

Pembahasan ini mengacu pada nasionalisme Tiongkok yang sangat kuat, dan berpengaruh pada pengambilan kebijakan domestic untuk membangun identitas. Sehingga penulis berfokus pada nilai-nilai nasionalisme yang akan dianalisis melalui pandangan Kanchan Chandra, tentang proses pembentukan identitas dengan nilai konstruktivisme.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, sebagai landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. *Nasrullah Noor Edikresnha, pada tahun 2012 dengan judul "Implementasi Konsep Nasionalisme China di Era Globalisasi terhadap Etnis Minoritas Uighur di Xinjiang pada tahun 2001-2010."* Penelitian ini berfokus pada bahasan bagaimana implementasi nasionalisme Tiongkok, yang sekarang telah dipengaruhi oleh arus Globalisasi, terhadap etnis minoritas Uighur pada abad ke-2. Serta akan melihat kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh Tiongkok untuk menghadapi ancaman "tiga setan" yaitu ekstrimisme, terorisme, dan separatisme. Penelitian ini juga membahas tentang hubungan Tiongkok terutama Xinjiang dan

negara-negara tetangga di sekitarnya. Kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat Uighur, akan berdampak pada kondisi hubungan luar negeri Tiongkok (Edikresnha 2012, 4).

Pandangan dunia internasional, terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok kepada masyarakat Uighur, cenderung bersifat negatif serta dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Adanya anggapan tersebut, sebagai bentuk dinamika masyarakat dalam dunia sosial, kemudian dibahas lebih lanjut dalam penelitian yang ditulis oleh Nevy Rusmarina Dewi dkk, pada tahun 2020 dengan judul “*Dinamika Kemanusiaan Muslim Uighur di Cina*” dalam *Journal of Social Science Teaching*. Fokus penelitian ini membahas kebijakan pemerintah Tiongkok sangat mendiskriminasi masyarakat Uighur dalam hal pembatasan hak-hak hidup mereka. Adapun beberapa pelanggaran HAM yang dimaksud dalam penelitian ini berupa genosida atau upaya penghapusan peradaban dan juga pembersihan ras dengan cara memaksa entitas yang berbeda dengan ras asli China untuk mengikuti kebiasaan dan budaya mereka, sehingga diberlakukan kebijakan-kebijakan seperti penyebaran etnis Han ke berbagai wilayah di Tiongkok untuk menyebarkan paham komunis. Tujuan dari pemberlakuan salah satu kebijakan tersebut yakni, agar masyarakat muslim (Uighur) berbaur dengan masyarakat lainnya. Tiongkok ingin mempertahankan ideologi negara mereka dengan cara mendoktrin paham komunisme.

Penelitian ini juga membahas terkait respon dunia internasional yang tidak dapat menjangkau isu ini secara spesifik, sebab isu ini merupakan urusan domestik Tiongkok dan juga Tiongkok dianggap menutupi keadaan dalam negerinya terutama dalam isu Uighur. Adanya hal tersebut berpengaruh pada permasalahan

yang dirasakan oleh masyarakat Uighur, mereka merasa bahwa kurang mendapat dukungan dunia internasional. Hal lain yang menarik pada penelitian ini adalah sedikit membahas tentang respon Indonesia, pemerintah Indonesia ternyata juga sama seperti negara lain yang tidak aktif menanggapi permasalahan Uighur, dikarenakan berkaitan dengan urusan ekonomi. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan bahasan bahwa terdapat dilemma sikap dari dunia internasional terhadap isu yang melibatkan masyarakat Uighur (Dewi 2021).

Masyarakat internasional yang mempertanyakan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Uighur selalu mengaitkan isu ini dengan pelanggaran HAM. Namun, Tiongkok memiliki alasan tersendiri terkait kebijakan yang diambil. Dalam penelitian yang ditulis oleh *Antar Zidane* dengan judul *China's National Interest As The Main Conductor Of Uighur Issues*, penelitian pada tahun 2020 ini menyebutkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya isu Uighur adalah konsep nasionalisme. Adanya konsep tersebut, menyebabkan pemerintah Tiongkok berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam bentuk teritori, sebagai tempat tinggal masyarakat Uighur yakni Xinjiang. Xinjiang sebagai daerah otonom memiliki keistimewaan. Selain secara geografis merupakan bagian dari jalur sutra dan merupakan kota dagang, daerah yang ditempati oleh sebagian besar masyarakat Uighur ini sangat strategis bagi keperluan perdagangan internasional. Namun, hal ini kemudian menyebabkan kerugian bagi masyarakat Uighur. Penelitian ini juga membahas salah satu tindakan Tiongkok untuk masyarakat Uighur di Xinjiang yakni program transmigrasi suku Han di Xinjiang pada tahun 1959-1960. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, masyarakat Uighur yang secara fisik dan budaya berbeda menyebabkan timbulnya rasa primordialisme membuat mereka ingin

memisahkan diri dari Tiongkok. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Uighur yakni pembentukan ETIM, salah satu gerakan Islam Turkestan Timur. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya politik internasional memiliki kekuasaan yang besar dan akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi. Sehingga, pemerintah Tiongkok akan memperjuangkan kekuasaan tersebut untuk mempertahankan kekuatan serta nasionalisme negaranya (Zidane 2020, 283-293).

Upaya pemerintah Tiongkok untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya dilakukan dengan menghadapi segala ancaman terorisme dan ekstrimisme yang dilakukan oleh masyarakat Uighur. Hal ini kemudian dibahas secara detail dalam penelitian dengan judul “*Upaya Pemerintah China dalam Mengatasi East Turkestan Islamic Movement (ETIM) Pasca Serangan Tiananmen Square*” yang ditulis oleh Habibah Abdaliah pada tahun 2020. Adanya tindakan perlawanan dari Uighur, sebagai respon dari kebijakan pemerintah Tiongkok yakni dengan membentuk ETIM atau Gerakan Turkestan Timur yang cenderung bersifat mengancam keamanan negara Tiongkok. Gerakan ini bersifat frontal dengan melakukan berbagai tindakan yang mengancam keamanan nasional Tiongkok. Dengan adanya hal ini pemerintah Tiongkok melakukan beberapa upaya yang tergolong dalam 2 kategori, yakni upaya internal dan eksternal dalam penanggulangan gerakan ETIM. Upaya internal yang dilakukan Tiongkok mencakup adanya penegakan dari pemerintah Tiongkok terkait hukum pidana dan ratifikasi Undang-Undang Kontra Terorisme. Pemerintah Tiongkok meningkatkan operasi penegakan hukum di Xinjiang dan mempromosikan persatuan antar-etnis dan memerangi ekstrimisme. Upaya Eksternal yakni Tiongkok bekerjasama dengan organisasi internasional yaitu *Shanghai Cooperation Organization (SCO)* dalam

hal penegakan hukum dan melakukan pelatihan-pelatihan kontra terorisme yang melibatkan pasukan militer dan kepolisian. Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini kemudian dibuktikan berhasil, sebab setelah melakukan kebijakan tersebut, gerakan ekstrimisme seperti pemboman yang dilakukan oleh ETIM mulai berkurang (Abdaliah 2020, 1-16)

Pembahasan selanjutnya ditulis oleh Melpayanty Sinaga pada tahun 2021, dengan judul *Ketegangan Etnis di China: Konflik Xinjiang dalam Perspektif Konstruktivisme*. Penelitian ini menjelaskan tentang interaksi antar masyarakat Uighur sebagai etnis minoritas di Tiongkok dan etnis Han sebagai mayoritas di Tiongkok menciptakan pola interaksi sebagai musuh, sebab pada kedua etnis ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Adanya upaya resistensi yang dilakukan oleh Uighur untuk mempertahankan identitas budaya, semakin memperkeruh situasi antara dua etnis tersebut. Penelitian ini kemudian menggunakan perspektif konstruktivisme yang menjelaskan bahwa identitas etnis akan berpengaruh terhadap pola interaksi yang akan terbentuk di masyarakat. Dalam hal ini interaksi yang terbentuk antar Uighur dan Han tidak begitu baik, sehingga menyebabkan ketegangan antar etnis (Sinaga 2021, 105-110).

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Ryseldha Claudya Purba dengan judul “Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang di Tengah Tekanan Internasional” pada tahun 2020, menjelaskan tentang bagaimana Tiongkok mempertahankan hegemoni negaranya dengan sangat baik. Terdapat tumpang tindih pandangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga menimbulkan gejolak negatif dalam dunia internasional. Namun, Tiongkok secara tegas menyampaikan bahwa dalam mempertahankan

nasionalisme dan juga hegemoninya, Tiongkok tidak melakukan tindakan diskriminasi budaya dan juga agama terutama pada daerah Xinjiang. Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok adalah untuk memperkuat kepentingan nasional, menjaga keamanan kawasan dan juga mencegah adanya perkembangan gerakan nasionalis dengan cara pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk melindungi Xinjiang sebagai salah satu wilayah yang penting di Tiongkok sehingga perlu adanya pencegahan dari extremism agama, terorisme dan separatisme (Purba 2020).

Beberapa penelitian diatas memberikan gambaran kepada penulis untuk menganalisis kebijakan dari pemerintah Tiongkok terhadap Uighur melalui perspektif yang lebih eksplisit, terutama dalam konsep nasionalisme yang ditekankan pada identitas dan juga nilai-nilai yang berusaha dipertahankan oleh Tiongkok.

Kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok pada masyarakat Uighur, yang merupakan etnis Muslim di Xinjiang bukan tanpa alasan. Uighur menjadi salah satu etnis Muslim yang mendapat perlakuan khusus atau kebijakan khusus oleh pemerintah Tiongkok. Mereka dianggap sebagai sebuah kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Tiongkok, sehingga perlu adanya pergerakan dari pemerintah untuk melindungi identitas serta nasionalisme Tiongkok dengan memberikan kebijakan berupa pembangunan kamp-kamp advokasi di Xinjiang dan beberapa kebijakan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur gerakan masyarakat Uighur, sehingga dapat menciptakan perdamaian dan kesatuan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Secara teoritis, identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup, dan ada dalam setiap etnis. Keberadaan identitas bersifat laten, serta potensial dan dapat muncul sewaktu-waktu sebagai sebuah kekuatan politik. Sedangkan secara empiris, identitas merupakan aktualisasi politik yang terbangun oleh adanya konstruksi dari masyarakat yang mengalami proses internalisasi secara terus menerus, melalui interaksi sosial. Menurut seorang sosiolog asal Spanyol, yakni Manuel Castells, terdapat salah satu bentuk pembangunan identitas berupa, identitas legitimasi (*legitimizing identity*). Cara pembentukannya ini, diperkenalkan oleh institusi, yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dominasi terhadap aktor-aktor sosial. Sehingga, dapat didefinisikan bahwa politik identitas, adalah aliran politik yang berusaha untuk melibatkan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik, agama, serta orientasi. Politik identitas, mulai diupayakan dengan memasukkan nilai-nilai dominasi melalui peraturan (Buchari 2014). Hal ini sejalan dengan pengertian identitas etnis yang disampaikan oleh Kanchan Chandra. Bahwa identitas etnis, ditentukan oleh aturan keanggotaan dan bukan oleh ciri-ciri lain seperti budaya, bahasa, sejarah atau wilayah yang sama. Identitas etnis menekankan pada peran pengakuan keanggotaan dan kepatuhan terhadap aturan yang diberikan aktor sebagai anggota.

Pada pandangan Konstruktivis politik etnis, fenomena sosial bukan merupakan proses alamiah, melainkan terbentuk dari adanya penciptaan dan interpretasi. Konstruktivisme, berasal dari adanya konstruksi sosial, yang menganggap bahwa dunia merupakan sebuah kenyataan. Konstruktivis Politik Etnis juga memandang, bahwa identitas merupakan sebuah fenomena yang

dipimpin dan bukan ditentukan. Dalam pembahasan yang disampaikan oleh Kanchan Chandra terkait politik etnis, peranan identitas dapat menjadi produk dari adanya fenomena politik atau ekonomi, yang dapat menciptakan perubahan etnis. Politik etnis bersifat tidak tunggal dan juga tidak tetap. Dalam hal ini, Konstruktivis Politik Etnis menjadi sebuah resolusi teoritis yang utama dalam studi identitas etnis. Konstruktivisme ini menunjukkan bahwa identitas dapat berubah dalam skala yang besar. Pandangan ini juga menyebutkan bahwa individu memiliki identitas etnis yang ganda, dan dapat berubah secara langsung melalui internalisasi ke proses politik dan ekonomi. Individu dapat memiliki identitas yang beragam, serta terbentuk dari unsur dalam masyarakat itu sendiri. Identitas etnis juga dapat menjadi unsur yang menyebabkan proses modernisasi, keruntuhan negara, desain institusional, kekerasan dan persaingan politik dan ekonomi.

Kemudian terdapat struktur dalam dunia sosial yang bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Proses tersebut akan menghasilkan perubahan pada aktor yang dituju.

Kunci dari Konstruktivis Politik Etnis yakni:

1. Individu memiliki identitas etnis yang banyak.
2. Identitas etnis dapat berubah dan dikonstruksi.
3. Fenomena yang terjadi, adalah proses dari manusia (Chandra, Constructivist Theories of Ethnic Politics. 2012)

Penelitian ini akan memfokuskan pada pandangan dari Kanchan Chandra, terutama pada proses pembentukan identitas dalam dunia sosial, melalui

konstruktivisme. Terdapat proses dalam membentuk identitas etnis menurut konstruktivisme yang digagas oleh Kanchan Chandra, yakni:

1. Modernisasi

Dalam konstruktivisme yang membentuk politik etnis, terdapat beberapa variabel kunci yang mempengaruhi perubahan identitas etnis. Istilah modernisasi mengacu pada proses sosial ekonomi yang merupakan aspek transisi dari masyarakat agraris ke industri, dalam hal ini termasuk kapitalisme cetak, munculnya teknologi komunikasi baru dan industrialisasi.

Adanya modernisasi di suatu bangsa merupakan sebuah penciptaan budaya bersama di antara individu-individu yang hidup dalam batas-batas politik yang sama, kemudian juga sering disebutkan sebagai penerapan pada budaya nasional, dan etnis identitas secara bergantian. Modernisasi mempengaruhi identitas etnis, terutama melalui bahasa. Hal ini dikarenakan populasi pra-modern dicirikan dengan dialek dan bahasa daerah yang terisolasi. Adanya modernisasi mengubah linguistik ini melalui beberapa mekanisme. Alasan pentingnya modernisasi dalam sebuah aspek pembentukan identitas yakni:

- Dengan munculnya teknologi komunikasi baru seperti radio dan televisi, akan menciptakan bidang komunikasi terpadu. Setiap individu harus menggunakan konsep yang sama dan kata-kata yang sama untuk memahami satu sama lain.

- Kemajuan industrialisasi, membutuhkan tenaga kerja yang melek huruf dan harus memahami standarisasi bahasa.

Modernisasi ini dapat mengubah tata bahasa melalui beberapa mekanisme. Negara harus menciptakan sistem pendidikan terpusat, untuk mendidik warga negara dalam satu bahasa. Maka secara tidak langsung sebuah populasi yang berbeda akan berbicara pada satu standar bahasa yang sama, dan menjadi satu kebangsaan yang sama.

2. Lembaga Kognisi dan Insentif

Dalam proses membentuk sebuah identitas etnis, Kanchan Chandra membedakan cara kerja dari lembaga insentif dan lembaga kognisi. Lembaga insentif mencakup kebijakan yang mengatur alokasi dalam bidang pekerjaan dan layanan serta bergerak pada bidang kepartaian dan pemilihan umum. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga insentif ini dirancang untuk menghasilkan perubahan dalam identitas etnis, namun terkadang memiliki tujuan lain. Sedangkan lembaga kognisi, lebih mempengaruhi perubahan etnis dengan memanfaatkan kerangka berpikir manusia, dan menganggap bahwa individu merupakan kategori utama untuk menjalankan perubahan etnis.

Lembaga kognisi memiliki peran untuk membentuk identitas etnis, bukan hanya mengawasinya. Upaya yang dilakukan, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dalam negara dapat membangun identitas yang bertahan dalam waktu yang lama. Lembaga/kognisi berperan sebagai aktor yang mempengaruhi perubahan identitas bukan mengubah secara keseluruhan dan terkesan memaksa. Dalam proses pembentukan

identitas melalui lembaga, dapat mempengaruhi perubahan identitas etnis dalam tiga cara yang berbeda, yaitu:

- Penciptaan identitas melalui keturunan.
- Terdapat penciptaan aturan atau interpretasi tentang nilai-nilai.
- Terdapat pemaksaan batasan dalam konteks tertentu.

Salah satu mekanisme batasan untuk menghasilkan identitas dilakukan dengan penghapusan nilai-nilai atribut individu. Mekanisme ini dapat mengubah aspek-aspek identitas etnis secara perlahan, dan dalam jangka waktu yang lama.

3. Kekerasan

Pembentukan identitas, juga diupayakan dengan cara kekerasan. Upaya tindakan kekerasan dapat mengakibatkan aktivasi tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya diskursi masa lalu terhadap identitas etnis. Adanya perubahan identitas dengan menggunakan kekerasan, dapat mengaktifkan identitas etnis dengan tingkat kecepatan dan frekuensi yang moderat. Hal ini memberikan kesempatan pada wacana masa lalu dan kepentingan elit saat ini untuk berinteraksi, dan menghasilkan aktivasi identitas etnis. Pembentukan identitas etnis melalui kekerasan, dapat membentuk:

- Sarana untuk menciptakan kekompakan diantara para anggota kategori identitas etnis yang ada sebelumnya.
- Sarana bagi pihak untuk mengaktifkan kategori identitas etnis dan mengawasi batasnya.
- Kekerasan dapat mempengaruhi perubahan identitas etnis dengan

mengubah makna dan praktik (Chandra, *Constructivist Theories of Ethnic Politics* 2012).

Dari pendalaman konsep di atas, proses pembentukan identitas etnis dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dalam hal ini pemerintah Tiongkok, melalui kekerasan yang diwujudkan dalam kebijakan terhadap masyarakat Uighur. Adapun beberapa kebijakan seperti Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa, Pengawasan Massal dan Kelas Xinjiang merupakan upaya dari pemerintah Tiongkok, untuk mewujudkan pembentukan identitas untuk mencapai nasionalisme yang kuat.

4. Perlindungan

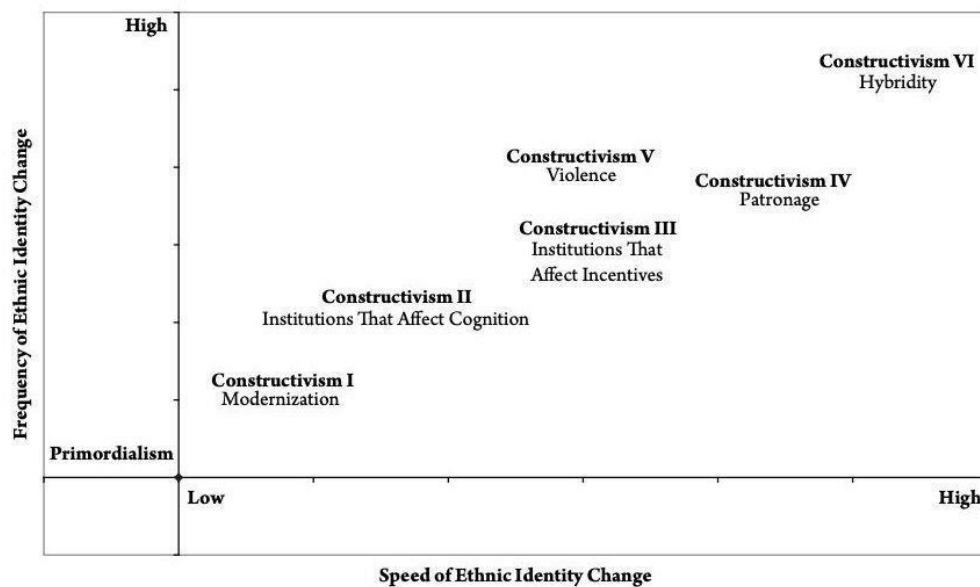
Konstruktivisme Politik Etnis membahas juga bagaimana identitas etnis dapat berubah pada tingkat frekuensi dan kecepatan sedang. Proses pembentukan identitas bersifat beragam, sehingga frekuensi aktivasi identitas etnis juga beragam. Pada aspek ini, kita tidak bisa menganggap bahwa setiap etnis dalam satu teritorial yang sama, juga memiliki identitas yang sama. Maka, aspek ini mengedepankan penyampaian informasi yang terbatas dan rata-rata. sebagian informasi tersebut, hanya dapat diterima oleh identitas etnis yang cakupannya kecil. Politik kemudian menjadi alat untuk mengaktifkan kategori identitas etnis, dengan cara melakukan pemilu.

5. Hibriditas

Konstruktivisme dalam studi identitas etnis, melihat bahwa manusia memiliki cara untuk menafsirkan sebuah fenomena sosial yang

terjadi secara alami, menjadi satu hal yang terstruktur. Bagaimana hal tersebut dapat ditafsirkan dengan baik, dan membentuk aktivasi etnis. Dunia sosial tidak dapat terbentuk, jika tidak ada interpretasi. Sehingga fenomena sosial menjadi hal yang penting untuk ditelaah sebelum membentuk sebuah identitas etnis.

Gambar 1.1 *Speed of Ethnic Identity Change*



Sumber: (Chandra, Constructivist Theories of Ethnic Politics. 2012)

Penelitian ini secara khusus akan menggunakan tiga, dari lima cara tersebut untuk menganalisis tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur, dalam penyeragaman identitas. Adapun tiga cara tersebut adalah Modernisasi, Lembaga Kognisi dan Kekerasan.

1.7 Argumen Sementara

Diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Uighur yang diduga berasal dari kebijakan pemerintah Tiongkok, menciptakan sebuah perspektif negatif

terhadap Tiongkok. Dalam hal ini terdapat alasan jelas dari pemerintah Tiongkok untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat Uighur yang memiliki identitas serta budaya yang berbeda, memberikan sebuah kekhawatiran kepada pemerintah Tiongkok, akan lunturnya identitas dan nilai nasionalisme mereka, yang sudah dibangun sejak lama. Hal ini bukan tanpa alasan, masyarakat Uighur yang memiliki sejarah pemberontakan juga menjadi salah satu alasan pemerintah Tiongkok melakukan antisipasi, demi keamanan dan keutuhan nasionalismenya. Maka dari itu, pemerintah Tiongkok mengupayakan penyeragaman identitas dan nasionalisme melalui beberapa tindakan tegas, yang diwujudkan melalui beberapa kebijakan. Yakni Pengawasan Masal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut, yakni sebagai upaya pembentukan gagasan yang sama dan rasa kepemilikan terhadap negara Tiongkok. Selain itu, hal lain yang diupayakan yakni pembentukan nilai-nilai yang sama, melalui interaksi, edukasi atau aturan-aturan yang harus diikuti, dalam hal ini berupa kebijakan tegas. Selain sebagai bentuk upaya penyeragaman identitas, kebijakan diatas juga merupakan sebuah antisipasi terhadap adanya gerakan separatisme, yang dilakukan oleh masyarakat Uighur. Sehingga, perlu adanya instrumen yang dapat mengelola kehidupan sosial masyarakat Uighur. Sebab, jika telah terbentuk satu gagasan yang sama, akan memudahkan penyeragaman identitas dan pemerintah Tiongkok dapat dengan mudah mengawasi masyarakatnya dari paham di luar nasionalisme Tiongkok. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok, sejalan sebagaimana yang dibahas oleh Konstruktivisme Politik Identitas, tentang proses pembentukan identitas etnis, yang tidak bisa terjadi begitu saja. Terdapat proses yang diklasifikasikan sebagai acuan dalam identitas

tersebut. Menurut Kanchan Chandra bahwa sebuah identitas merupakan hal yang dibentuk, dan bukan diberikan. Maka dari itu, penulis menganalisis bahwa tindakan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan tegas, sebagai bentuk implementasi pembentukkan gagasan yang sama dalam masyarakat. Hal ini bertujuan menyeragamkan identitas di Tiongkok, untuk mewujudkan nasionalisme yang kuat, serta sebagai wujud antisipasi terhadap gerakan separatisme yang dilakukan oleh masyarakat Uighur, demi menjaga keutuhan dan keamanan nasional Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis analisis berupa metode penelitian secara deskriptif, yang mana secara garis besar bahwa studi kasus yang terdapat dalam penelitian ini bersifat kompleks, sehingga perlu pendeskripsian terhadap permasalahan serta tindakan yang jelas agar pembaca dapat mengetahui fenomena secara rinci. Metode penelitian deskriptif juga diutarakan oleh Sukmadinata, sebagai suatu penelitian yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena, baik Fenomena Alamiah maupun buatan manusia yang berbentuk Aktivitas Karakteristik, Hubungan, Perubahan, Persamaan, dan Perbedaan yang terdapat antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya (Rahma 2020). Dalam pengambilan jenis penelitian deskriptif ini, penulis nantinya dapat menganalisis tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, dalam hal ini permasalahan Uighur di Xinjiang dan seperti apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok terhadap kaum Uighur itu sendiri.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kebijakan terhadap masyarakat Uighur. Sedangkan Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Tiongkok, bagaimana respon pemerintah Tiongkok terhadap pergerakan etnis Uighur sehingga pemerintah Tiongkok perlu melakukan kebijakan-kebijakan terhadap etnis Uighur, terutama pembangunan kamp-kamp advokasi sejak tahun 2014, yang banyak mengundang pro-kontra di masyarakat internasional.

1.8.3 Metode Pengambilan Data

Dalam upaya pengambilan data menggunakan data sekunder, yang mana bahwa data sekunder menurut Achmad Budi Yulianto, merupakan suatu data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa (Yulianto 2018) Data sekunder didapatkan melalui jurnal, buku, berita online, serta pada artikel yang valid. Sehingga penulis dapat menjadikan sumber dalam melakukan penelitian untuk melihat kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Uighur dari data-data tersebut di atas.

1.8.4 Proses Penelitian

Mencari literatur

Pada tahap awal penulis mencari berbagai sumber data yang akan dijadikan sumber literatur untuk melakukan proses penelitian ini, penulis juga mencari sumber yang relevan dan berkorelasi dengan pembahasan yang akan diteliti. Literature-literature yang didapatkan adalah melalui pencarian buku-buku, artikel, berita-berita online, serta beberapa penelitian sebelumnya, berupa skripsi dan juga

jurnal -jurnal yang berkaitan dan memiliki kesamaan topik maupun teori, dengan penelitian ini.

Analisis literatur

Setelah melakukan pencarian literatur, penulis kemudian mulai membaca isi dari setiap literature yang didapatkan. Analisis literature, membantu penulis untuk mendalami setiap bahasan yang berkaitan dengan tema penelitian ini serta untuk memahami fakta-fakta yang dapat diambil serta diimplementasikan dalam menganalisis tema. Proses ini cukup memakan waktu lama, karena penulis membaca secara detail dan mencoba memahami serta mengambil inti pokok pembahasan dari setiap literature yang ada, kemudian penulis mengkorelasikan dengan tema dari penelitian ini.

Menulis literatur

Setelah melakukan proses pencarian literatur dan kemudian menganalisis berbagai literatur tersebut, selanjutnya penulis mulai melakukan penulisan pada penelitian ini. Penulisan yang akan dilakukan pada penelitian ini akan mengacu pada literatur yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Informasi dan fakta yang telah penulis dapatkan akan menjadi data dan dianalogikan dalam sebuah penelitian yang logis. Setelah melakukan analisis terhadap beberapa literatur, penulis beranggapan bahwa kasus di daerah Xinjiang merupakan kasus yang informasinya tumpang tindih, serta penulis pertama kali melihat adanya sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam, mengikuti kaidah akademik. Seperti kontradiksi pada pembangunan kamp-kamp advokasi di Xinjiang yang menurut masyarakat Uighur itu merupakan sebuah diskriminasi terhadap mereka dan pendapat yang sama juga disuarakan oleh masyarakat Internasional, namun jika melihat dari sisi pemerintah Tiongkok bahwa

adanya kamp-kamp advokasi tersebut bertujuan untuk melatih masyarakatnya demi mengurangi ekstrimisme dan gerakan separatis lainnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada pembuatan sistematika pembahasan penulis akan mengaitkan susunan pembahasan untuk perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Adanya sistematika ini juga akan dijadikan sebagai panduan untuk melakukan penelitian ini, agar dapat terstruktur dan sesuai alur pembahasan, adapun beberapa tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada Bab ini, penulis membahas terkait awal mula adanya diskriminasi terhadap masyarakat Uighur. Diawali dengan latar belakang adanya masyarakat Uighur serta sedikit menyinggung alasan pemerintah Tiongkok membuat kebijakan tersebut. Terdapat rumusan masalah dari penelitian, kemudian tujuan penelitian, signifikansi, serta cakupan penelitian. Di bab ini juga terdapat uraian terkait literatur yang digunakan sebagai pembanding maupun acuan. Terdapat juga landasan teori yang akan digunakan untuk meneliti yaitu konsep proses pembentukan identitas dalam politik etnis, oleh Kanchan Chandra melalui nilai. Selain itu dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian serta sistematika pembahasan pada penelitian ini.

BAB 2: Uighur dan Kebijakan Nasionalisme Tiongkok

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait dinamika perkembangan daerah Xinjiang serta awal pergerakan masyarakat Uighur yang ingin

memisahkan diri dari Tiongkok. Setelah membahas perkembangan tersebut, penulis akan melanjutkan bahasan tentang nasionalisme Tiongkok, serta respon masyarakat Uighur terhadap penerapan nasionalisme Tiongkok.



BAB 3: Upaya Penyeragaman Identitas Nasionalisme Tiongkok di Xinjiang 2014-2019.

Setelah pembahasan di atas, pada bab ini penulis akan menganalisis 4 kebijakan pemerintah Tiongkok dari perspektif pembentukan identitas etnis melalui Konstruktivisme. Yang mana terdapat berupa beberapa faktor kaitan konstruktivisme politik identitas berupa indikator pembentuk, dengan kebijakan yang diberlakukan kepada masyarakat Uighur.

BAB 4: Kesimpulan

Pada Bab terakhir penelitian ini, penulis akan merangkum semua pembahasan yang telah dianalisis pada bab 2 dan bab 3 yang akan menekankan pada alasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur yang akan dialami sesuai konsep dari perspektif pembentukan identitas dalam politik etnis, menurut Kanchan Chandra.

BAB 2

Uighur dan Kebijakan Nasionalisme Tiongkok Posisi Uighur terhadap Tiongkok

2.1 Posisi Uighur Terhadap Tiongkok

2.1.1 Sejarah Hubungan Tiongkok dan Uighur

Xinjiang merupakan bagian dari wilayah Tiongkok, dan diduduki oleh mayoritas masyarakat Uighur. Daerah ini memiliki sejarah yang panjang dan cukup memicu pergolakan di kalangan pemerintah Tiongkok sebab pergerakannya yang memicu ketegangan. Xinjiang sempat mengalami ketidakstabilan politik, dengan pola kepemimpinan yang terus berganti-ganti.

Sejarah tersebut dimulai pada abad ke-8 hingga 9 Masehi, Xinjiang dipimpin oleh Kekaisaran Uighur Khaganate. Selama kepemimpinan tersebut, sebutan masyarakat “Uighur” belum familiar, mereka biasanya disebut sebagai ‘Orang-orang Turk’. Kemudian, pada tahun 1874 terjadi perang antara Dinasti Qing dan Panglima perang Uzbek, yakni Yakub Beg. Peperangan terjadi cukup panjang dan sengit untuk memperebutkan wilayah Xinjiang, kemudian perang dimenangkan oleh Dinasti Qing. Setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan Dinasti Qing, pemerintah kemudian merubah nama daerah yang mayoritas diduduki oleh masyarakat Uighur tersebut, dengan sebutan Xinjiang yang artinya ‘Batas Baru’. Kemudian pada tahun 1884, setelah berhasil dikuasai oleh Dinasti Qing, yang merupakan bagian dari sejarah kerajaan Tiongkok, lalu menciptakan provinsi Xinjiang (CNN 2018).

Selanjutnya, pada tahun 1940, Terjadi pemberontakan oleh masyarakat Uighur. Pergerakan ini bertujuan untuk mengambil alih wilayah Tiongkok.

Pemberontakan tersebut berhasil melahirkan Republik Turkestan Timur, sebanyak dua kali dalam periode yang berbeda, yakni pada tahun 1933 dan 1944. Namun republik ini tidak bertahan lama. Tepatnya pada bulan Oktober tahun 1949, Turkestan Timur berhasil digulingkan oleh pasukan Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA) (Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China 2018).

Setelah keamanan mulai stabil, pada tahun 1955 Uighur ditetapkan sebagai kebangsaan resmi dan Xinjiang diberikan hak sebagai daerah otonom. Keputusan ini diambil oleh pemerintah pusat Tiongkok. Pada sekitar tahun 1978-1992 di akhir Perang Dingin., terdapat usaha yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mempersatukan masyarakat Uighur dan masyarakat Tiongkok lainnya. Yakni dengan proses asimilasi etnis Han ke Xinjiang. Hal ini, sempat meredam gejolak yang terjadi antara pemerintah Tiongkok dan masyarakat Uighur, pada masa kepemimpinan Deng Xiaoping. Saat itu, pemerintah memberikan kebebasan untuk mengekspresikan budaya serta agama di Xinjiang. Namun, kebebasan tersebut tidak berlangsung lama, setelah masuknya gerakan radikal Islam yang dipelopori oleh Al-Qaeda, terdapat dugaan bahwa paham ini akan membawa ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme, serta akan mengancam keamanan nasional Tiongkok (Indonesia 2018).

Pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur pada periodisasi modern, mulai berbahaya dan sudah pada tahap kekerasan. Sebab pada periode modern, terjadi beberapa pemberontakan disertai dengan pengeboman, penyanderaan warga sipil hingga pembunuhan kepada aparat kepolisian. Berikut beberapa kejadian yang dilakukan oleh gerakan ekstrimisme tersebut:

1. Pada 1997 masyarakat Uighur melakukan demonstrasi, yang dinamakan tragedi Ghulja. Demonstrasi ini, dilakukan untuk menyerukan kebebasan beragama dan budaya serta kebebasan untuk berbicara. Namun, demonstrasi ini tidak berjalan baik, sebab terdapat perlawanan oleh pasukan keamanan yang melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Sebanyak 30 orang Uighur tewas ditempat, dan ratusan lainnya terluka (Bergen 2011).
2. Pergerakan lainnya terjadi pada tahun 2008, dan mulai disoroti oleh media internasional. Terutama kejadian menjelang Olimpiade Beijing tahun 2008 dan kerusuhan di tahun 2009 yang terjadi di Urumqi. Dari kejadian yang dipelopori oleh kelompok teroris, separatis dan ekstrimisme ini menyebabkan sekitar 200 orang tewas dan 1700 orang terluka (Purba 2020).
3. Pada tahun 2013, terjadi serangan bunuh diri oleh tiga orang Uighur yang menewaskan 5 orang dan 38 orang luka-luka. Kejadian ini terjadi di Beijing.
4. Pada 22 Mei 2014, terjadi pengeboman yang menewaskan 43 orang dan melukai 94 orang (Shan n.d.).
5. Pada 2016 terjadi bom bunuh diri, dan juga penabrakan di Kedutaan Besar Tiongkok di Kyrgyzstan. Kejadian ini melukai 3 orang yang merupakan karyawan berkebangsaan Kyrgyzstan (Bom Bunuh Diri Meledak di Kedutaan China di Kyrgyzstan 2016).

Kejadian di atas menggambarkan adanya gerakan nyata untuk memerdekakan diri dari Tiongkok, berupa pemberontakan dari masyarakat Uighur

sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional Tiongkok. Adanya sejarah kelam terhadap keamanan nasional Tiongkok, membuat pemerintah melakukan antisipasi yang cukup ketat, terutama pada masyarakat Uighur. Adanya sentimen terhadap Pemerintah Tiongkok, membuat pemerintah sulit menghadapi masyarakat Uighur. Pemerintah Tiongkok merasa harus mengawasi masyarakat Uighur dengan sikap yang cukup keras dan perlu diawasi pergerakannya, sebab dianggap rentan terparap oleh radikalisme.

Masyarakat Uighur sebagai representasi etnis minoritas di Tiongkok, menggambarkan bahwa kesenjangan dalam kehidupan sosial, akan terjadi jika tidak ada satu identitas yang sejalan untuk menguatkan dan mengatur pola kehidupan sosial. Adanya peraturan mengenai tatanan hidup masyarakat akan memberikan kestabilan dan pengaturan yang baik dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakatnya. Pemerintah Tiongkok berusaha untuk menanamkan nilai tersebut melalui nilai nasionalisme.

2.1.2 Masyarakat Uighur

Uighur merupakan etnis minoritas yang memiliki jumlah populasi sebesar 45%, dan jumlah penduduk di Xinjiang mencapai 18 juta orang (Hidayat 2013). Sebagian besar berada di barat Laut China. Uighur merupakan keturunan suku kuno yakni Kekhanan Uighur, yang tersebar sampai ke Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Uzbekistan. Suku ini menggunakan bahasa Uighur yang merupakan turunan dari bahasa Turki (Purba 2020). Adanya kedekatan yang terjadi antara masyarakat Uighur dan negara-negara Asia Selatan disebabkan oleh:

1. Adanya kesamaan budaya, yang mana kedua negara tersebut cenderung mengadopsi budaya Timur tengah.

2. Persamaan sejarah di masa lalu.
3. Bentuk keyakinan yang sama, yakni Islam.

Kesamaan-kesamaan tersebut menciptakan sebuah afiliasi yang erat antar keduanya (Laylia 2018, 1-3).

Secara geografis, Xinjiang terletak di bagian tengah Benua Eurasia di perbatasan barat laut Tiongkok. Terdapat Gurun terbesar di Tiongkok, yakni Gurun Takla Makan. Sebagian besar wilayah ini, meliputi gurun pasir seperti Gobi dan pegunungan yang tertutup salju dan gletser. Wilayah ini mencakup seperenam dari total wilayah Tiongkok, namun hanya sekitar 4,3% wilayah yang memiliki penghuni (*Amazing Landscapes of China's Xinjiang, n.d.*). Xinjiang terkenal dengan daerah pegunungan yang sepi, memiliki iklim yang sedang dan dikelilingi oleh gurun yang luas (UNESCO n.d.). Letak daerah Xinjiang berdekatan dengan pusat perdagangan kuno dan jalur sutra yang berbatasan dengan Rusia dan Tiongkok. Etnis yang menduduki wilayah tersebut selain Uighur, yakni Urumqi dan Kashgar (Zidane 2020).

Dalam posisi Administratif, Tiongkok memiliki sistem sentralisasi politik yang kuat, namun memiliki desentralisasi keuangan (fiskal) yang tinggi, sehingga keuangan Tiongkok sangat tersentral di pemerintah pusat. Namun, sejak tahun 1979 perubahan desentralisasi fiskal mengarah pada pendapat daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah masing-masing. Dampak signifikan dari adanya desentralisasi fiskal adalah terdapat peningkatan pendapatan pemerintah daerah sebanyak 72% pada tahun 1993 yang sebelumnya hanya 45%. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan menyusun anggaran sesuai target daerah masing-masing. Adanya konsep desentralisasi fiskal ini,

membuat kewenangan pemerintah daerah di Tiongkok sangat besar dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dan bekerja sama (Ardinda 2020).

Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah Tiongkok memberikan hak otonomi ke Xinjiang. Pemerintah Tiongkok kemudian mengambil tindakan, bahwa kelompok minoritas dengan identitas yang kuat, diberikan semacam otonom yang memiliki kekuasaan terbatas (China's Autonomous Regions n.d.). Salah satu daerah tersebut adalah Xinjiang. Sebab, daerah ini merupakan wilayah penting bagi Tiongkok, terutama dalam hal perekonomian, yang menunjang desentralisasi fiskal. Xinjiang merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan dan juga peradaban (Wardhani 2011, 292-294). Adanya pemberian status sebagai daerah otonomi, membuat Xinjiang memiliki kewajiban untuk mengelola kebutuhan daerahnya dengan sepatutnya, tanpa melanggar aturan dari pemerintah Tiongkok

2.1.3 Dinamika Ekonomi dan Sosial di Xinjiang

Hubungan Tiongkok dan masyarakat Uighur cenderung konfliktual. Terdapat problematika yang membuat kesenjangan hubungan antar kedua etnis tersebut. Sejarah yang terjadi pada masa lalu berupa pemberontakan dan gerakan separatisme, membawa hubungan kurang harmonis antar masyarakat Uighur dan pemerintah Tiongkok. Hal ini dapat terlihat dari kesenjangan yang terjadi, pada sektor ekonomi dan juga dinamika kehidupan sosial. Adanya perbedaan budaya yang mencolok, serta kondisi perekonomian dan juga sumber daya alam yang berbeda antar daerah Xinjiang dan beberapa daerah lain di Tiongkok, membuat adanya perbedaan perilaku pada masyarakatnya. Secara ekonomi, masyarakat di Xinjiang cenderung memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sebuah mata pencaharian namun mereka tidak secara maksimal dapat mengelola potensi

tersebut, sehingga terdapat dominasi oleh masyarakat Han dalam sektor ekonomi. Selain itu, kehidupan sosial di Xinjiang juga tidak begitu baik, sebab terdapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan, yang diterima oleh masyarakat Uighur. Berikut beberapa kondisi yang terjadi dibidang ekonomi dan juga sosial di Xinjiang:

1. Perkembangan Ekonomi di Xinjiang

Pada masa reformasi tahap kedua di Tiongkok, yakni pada tahun 1980-an pasca Perang Dingin, daerah Xinjiang menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah Tiongkok. Terdapat penemuan minyak bumi dan gas alam sebanyak 1 miliar ton di Cekungan Tarim, tepatnya di area *Fuman Oilfield*. Yang Xuewen, manajer umum Tarim *Oilfield* yang berdiri di bawah *China National Petroleum Corporation* (CNPC), menemukan area dengan cadangan minyak baru setelah melakukan pengeboran 56 sumur di *Fuman Oilfield*. Xinjiang sebagai zona penghasil minyak utama sekitar 8.000 meter dibawah permukaan bumi dan merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Tiongkok, dengan sekitar 16 miliar ton cadangan minyak dan gas. Adanya penemuan ladang minyak ini, membuat produksi tahunan meningkat dari 30.000 ton menjadi 1,52 juta ton pada tahun 2020 (Times 2021).

Bentang alam yang unik seperti punggung bukit, sungai dan zona vegetasi yang berbeda dari wilayah Tiongkok lainnya, menjadikan wilayah ini kawasan industri yang memiliki potensi yang besar. Upaya pengembangan di masa depan, berfokus pada peluang untuk menambah dan memperluas kawasan industri, mengeksplorasi potensi masyarakat

khususnya warga lokal. Untuk meningkatkan integritas pengelolaan sumber daya alam disana. Sebagai daerah dengan unit administrasi yang cukup stabil, Xinjiang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997-2004 sekitar 10,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Fokus pengembangan kesejahteraan di Tiongkok, terus diupayakan. Terutama pada bidang sosial dan ekonomi, Tiongkok berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggiatkan hubungan dengan negara maju, guna membangun hubungan produksi dan menciptakan kekuatan yang produktif. Upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok, bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi dan menciptakan produktivitas yang tinggi dikalangan masyarakat Tiongkok.

2. Keadaan Sosial Masyarakat Uighur

Perkembangan kehidupan sosial di Xinjiang tidak begitu baik, sebab secara umum masyarakat Uighur tidak memiliki kontrol bebas terhadap kehidupan sosialnya. Terdapat dominasi oleh masyarakat Han dalam segala bidang. Hal ini dilakukan sebagai upaya asimilasi, untuk mencapai penyeragaman identitas di Tiongkok. Adapun tujuan dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama, dilakukan dengan melibatkan masyarakat Tiongkok. Salah satu kebijakan tersebut yakni, peleburan etnis Han ke Xinjiang.

Suku Han memiliki posisi yang cukup dominan, sebab pemerintah melakukan asimilasi suku Han di Xinjiang secara besar-besaran sebagai bentuk peleburan etnis di Uighur, kemudian mendorong adanya kontrol

terhadap daerah tersebut. Populasi Han di Xinjiang hampir setara dengan populasi masyarakat Uighur, yakni (41%) dan Uighur sebanyak (45%) (Hidayat 2013). Upaya pengembangan kehidupan sosial dan juga ekonomi, sejatinya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Uighur. Terdapat kesenjangan yang terjadi antar mereka, yakni:

- Masyarakat Uighur yang berdiam di Xinjiang, merasa bahwa dengan Sumber Daya Alam yang melimpah, mereka seharusnya memiliki kekuatan dan kesempatan yang sama untuk mengolah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, ternyata sebagian besar SDA dikelola oleh suku Han dengan banyak mendirikan tempat industri yang mempekerjakan masyarakat Uighur sebagai buruh. Adanya perbedaan kondisi ekonomi dengan ekspektasi yang kurang melibatkan mereka, menciptakan situasi yang dianggap tidak adil bagi masyarakat Uighur di Xinjiang (Chaudhuri 2010, 9-21).
- Kesenjangan tersebut terjadi sebab adanya kontradiksi antar meningkatnya permintaan masyarakat akan kebutuhan material dan kekuatan produktif yang terbelakang. Kontradiksi ini, sangat menonjol pada daerah-daerah minoritas yang tidak memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri. Xinjiang sebagai salah satu daerah yang kurang terdampak modernisasi, selalu terkendala oleh fasilitas infrastruktur yang kurang berkembang, tingkat pendidikan dan keterampilan teknologi yang rendah serta perdagangan industri yang kurang berkembang. Hal ini menyebabkan potensi Sumber Daya Manusia di Xinjiang kurang

memadai. Permasalahan kontradiksi ini kemudian tidak langsung diselesaikan oleh pemerintah Tiongkok, sebab fokus mereka adalah memajukan kawasan industri dan tidak terlalu memperdulikan kesenjangan yang terjadi di masyarakatnya. Kontradiksi ini sudah sejak lama tidak memiliki solusi, hal ini terlihat dari pernyataan sekretaris partai komunis Hu Yaobang dan Perdana Menteri Zhao Ziyang, bahwa kawasan tersebut dalam hal ini Xinjiang, harus mendukung program pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju secara ekonomi di Tiongkok. Dalam pernyataan ini, masyarakat Uighur kemudian menyatakan bahwa keputusan pimpinan pusat ditujukan untuk merampas bagian dari anggaran pusat dan alokasi investasi modal. Selain itu rendahnya otonomi dalam proses pengambilan keputusan juga mencerminkan adanya kesenjangan besar di Xinjiang (Chaudhuri 2010, 9-21).

- Disekolah umum, siswa Uighur sering mendapat sentimen sebagai siswa yang tidak patuh, tidak pintar, tidak disiplin dan jorok. Hal ini memberikan jarak antar hubungan sosialisasi antar etnis Han dan Uighur (Sinaga 2021). Selain hal tersebut, anak-anak sekolah dari kalangan masyarakat Uighur cenderung diperlakukan dengan kasar seperti terdapat hukuman fisik dan emosional yang cukup rutin di sekolah. Anak-anak yang memiliki daya tangkap kurang cepat dalam memahami pelajaran, akan diberikan hukuman secara fisik dan yang paling parah adalah mereka akan dikirim ke ruang bawah tanah di sekolah. Hal ini disampaikan oleh dua kakak adik yakni Aysu dan

Lutfullah yang sempat mengenyam pendidikan di *state boarding schools in Xinjiang* (Feng 2022).

- Larangan penggunaan atribut agama, serta larangan beribadah juga sempat terjadi di Xinjiang. Larangan tersebut sebagai sebuah kampanye melawan ekstrimis Islam. Kebijakan ini berupa larangan memelihara jenggot yang memiliki ukuran yang panjang, penggunaan kerudung di ruang publik. Selain itu peraturan ini juga berlaku pada lingkungan umum, yakni stasiun dan bandara. Pekerja di ruang publik tersebut wajib “menghalangi” masuk warga yang menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Jika terdapat warga dengan ciri-ciri tersebut, para pekerja publik tersebut akan melaporkannya kepada polisi (Cina Larang Warga Xinjiang Pelihara Janggut Panjang dan Jilbab di Ruang Publik 2017).

Adanya kesenjangan baik dalam bidang sosial, agama dan budaya maupun ekonomi di kalangan masyarakat Uighur melatarbelakangi pergerakan mereka untuk melepaskan diri dari Tiongkok. Terlebih lagi adanya hubungan geografis, etnis dan budaya antar Xinjiang dengan Asia Selatan, sehingga mempengaruhi juga kehidupan sosial dan politik mereka. Adanya nilai-nilai yang ditanamkan kepada masyarakat Uighur, melalui karya yang mengagungkan masyarakat Uighur dan menyatakan bahwa mereka sebagai penduduk asli Turkestan Timur, sehingga harusnya Uighur dibebaskan dari kontrol Tiongkok. Pengaruh tersebut kemudian melahirkan diksi “pembebasan nasional” dan “penentuan nasib sendiri” (Tursun 2008, 88-100). Hal tersebut, sampai

saat ini menjadi wacana publik dikalangan masyarakat Uighur, sehingga mereka terus melakukan upaya pergerakan pembebasan dari Tiongkok.

2.2 Penguatan Nasionalisme Tiongkok

Penerapan Nasionalisme Tiongkok yang kuat berasal dari keterpurukkan di masa lalu berkaitan dengan salah satu konflik yang terjadi, yakni ancaman keamanan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur, dalam bentuk gerakan separatis. Hal tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah Tiongkok, untuk mulai bergerak maju dengan semangat kebangkitan nasional Tiongkok. Nasionalisme Tiongkok dibangun dengan memanfaatkan slogan “*Zhongguo Meng*” sebagai sebuah bagian dari simbol bahasa. “*Zhongguo Meng*” pertama kali disampaikan oleh Xi Jinping pada tanggal 12 November 2012, slogan ini disampaikan pada saat pameran dengan tema Jalan Kebangkitan (Nufus 2014, 43-53). Slogan ini diartikan sebagai sebuah bentuk ungkapan ide atas pikiran yang akan menimbulkan dampak emosi. Penggunaan slogan dijadikan sebagai visi oleh pemerintah Tiongkok, untuk membangun semangat nasionalisme rakyatnya. Slogan yang digunakan yakni menggunakan bahasa Tiongkok ‘*Zhongguo Meng*’ yang artinya ‘Impian Tiongkok’. Penggunaan tata bahasa yang memanfaatkan slogan sebagai alat politik, sangat mempengaruhi pergerakan pemerintah Tiongkok untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Slogan ‘*Zhongguo Meng*’ digunakan untuk membangkitkan nasionalisme dikalangan masyarakat Tiongkok, serta menumbuhkan perasaan cinta tanah air. Tujuan utama dari slogan tersebut untuk mewujudkan kebangkitan nasional. Melalui gagasan ‘*Zhongguo Meng*’ pemerintah mencoba menjadikan negara sebagai:

1. Aktor utama dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat.
2. Menciptakan rakyat yang sejahtera

Adapun kebangkitan nasional yang diharapkan oleh Tiongkok, bukan semata-mata untuk kepentingan nasional saja, namun disertai keinginan bahwa adanya impian Tiongkok akan mempengaruhi kesejahteraan dunia (Nufus 2014, 43-53). Harapan yang dibangun dengan adanya penerapan nasionalisme ini, yaitu menjadikan Tiongkok sebagai negara yang sejahtera dan kuat. Mengacu pada slogan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menguatkan nasionalisme negaranya yakni:

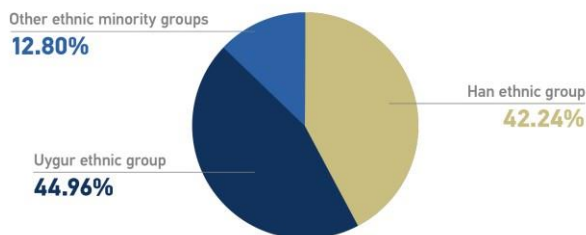
Peleburan Etnis Han di Xinjiang

Konsep nasionalisme di Tiongkok, yang mengarah pada penerapan langkah tegas untuk membela kepentingan nasional, diwujudkan dalam beberapa hal. Salah satunya peleburan etnis Han di Xinjiang dengan jumlah populasi sebanyak 6,7% pada tahun 1949 dan 40% pada tahun 2008 (Meancilla 2020, 368-369.). Seiring berjalannya waktu, populasi Han di Xinjiang setara dengan masyarakat Uighur yang tinggal disana.

Gambar 2.2 (Ethnic Minority Populations Grew)

Ethnic minorities account for nearly 60% of Xinjiang population

(Data as of October 2020)



Source: Xinjiang Uygur Autonomous Region statistic bureau

CGTN

Sumber: (Chart of the day: Xinjiang's population rises by 18.5 percent from 2010 to 2020 2021)

Dari total populasi di Xinjiang jumlah populasi etnis Han sebesar 42,24%, Uighur 45% dan etnis minoritas lainnya sebesar 57,6% (Chart of the day: Xinjiang's population rises by 18.5 percent from 2010 to 2020 2021). Kebanyakan etnis Han bekerja dibidang pertambangan dan ekspor hasil bumi di Xinjiang. Selanjutnya etnis Han juga mendominasi tatanan pemerintahan, mereka diberikan jabatan tinggi dan kekuasaan penuh sedangkan masyarakat Uighur selaku penduduk asli hanya sebagai pegawai rendahan dan pekerja kasar (Hidayat 2013).

Dengan dominasi etnis Han di Xinjiang menjadi sarana untuk mempromosikan nasionalisme Tiongkok, masyarakat secara langsung berkontribusi dalam membangun kembali kejayaan bangsa. Hal ini akan membentuk status negara yang besar dan kuat, serta akan menjadi kekuatan global (Lee 2014). Masyarakat harus mematuhi beberapa prinsip moral yang telah di bangun oleh sistem pemerintahan di tiongkok, yang mengacu pada ideologi komunis. Adapun beberapa prinsip tersebut yakni: Kemakmuran, demokrasi, kesopanan, harmoni, kebebasan, kesetaraan, keadilan, supremasi hukum, patriotism, dedikasi, integritas, dan keramahan. Untuk memperkuat prinsip diatas, Partai Komunis Tiongkok (CPC) membuat pedoman pada 23 Desember 2013, yang akan dijadikan kurikulum sebagai bahan ajar siswa di

sekolah dan juga menjadi domain nasional secara keseluruhan (Core socialist values 2017).

Peleburan etnis Han ke Xinjiang menjadi salah satu upaya penerapan nasionalisme. Sebab, sebagian besar elemen budaya Tiongkok, melekat pada etnis Han seperti bahasa, adat dan juga moral (Lee 2014). Etnis Han yang masuk ke Xinjiang diharapkan mampu menanamkan budaya serta nilai-nilai nasionalisme. Hal ini dimulai dari penyetaraan pemikiran serta perasaan memiliki identitas yang sama, berdasarkan pada pengakuan wilayah.

2.3 Penolakan Terhadap Nasionalisme Tiongkok

Pemerintah Tiongkok, tetap gencar menanamkan nilai nasionalisme pada seluruh lapisan masyarakat Tiongkok. Namun, penerapan nasionalisme ini tidak diterima oleh seluruh masyarakat, salah satunya yakni masyarakat Uighur di Xinjiang. Sebab, mereka merasa memiliki budaya dan kehidupan yang berbeda. Penolakan tersebut dilakukan dengan gerakan-gerakan yang ekstrim, seperti aksi teror yang banyak melukai warga sipil dan merusak infrastruktur pemerintahan. Hal ini kemudian dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai bentuk dari ancaman terhadap keamanan dan integritas nasional. Adapun beberapa alasan penolakan dari masyarakat Uighur, yakni:

1. Perasaan Primordialisme di kalangan Masyarakat Uighur

Primordialisme berarti memiliki perasaan kesukuan yang berlebihan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Uighur, terutama pada ciri fisik serta kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda dari masyarakat Tiongkok lainnya (Zidane 2020). Adanya adopsi kebudayaan dan

konsep modernitas dari daerah Asia Selatan terhadap dunia hiburan di Uighur, menambah sikap segregasi dikalangan masyarakat Uighur. Adanya perkembangan dunia hiburan seperti musik, yang terpengaruh oleh Asia Selatan, sebagai hasil dari interaksi yang dekat dengan masyarakat Uighur. Misalnya pada kesenian, masyarakat Uighur memiliki ciri khas kesenian musik yakni Muqam. Muqam dilakukan dengan menggabungkan musik klasik, puisi dan tarian. Sedangkan mayoritas suku di Tiongkok, memiliki ciri khas kesenian genre musik pop serta jenis kesenian lainnya yakni opera. Tiongkok sebagian besar mengadopsi budaya tersebut dari dunia barat (Chinese Arts & Music n.d.).

Adanya ciri khas yang berbeda, menambah kebanggaan dari masyarakat Uighur untuk mengklaim dirinya sebagai wilayah yang memiliki budaya sendiri. Sehingga masyarakat Uighur, berhak mengatur kehidupannya secara mandiri. Mereka menggambarkan proses kemajuan di Xinjiang dengan segala proses modernitas dan menjadikan Xinjiang sebagai daerah kosmopolitan tanpa bantuan dari otoritas Tiongkok. Adanya rasa istimewa akibat perbedaan yang cukup mencolok dari masyarakat Uighur, memberikan kekuatan tersendiri bagi masyarakat mereka untuk merasa mandiri dalam segala aspek.

2. *Sentimen terhadap identitas Han*

Adanya perbedaan bentuk fisik, agama dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Uighur memberikan kekuatan bagi mereka, untuk

membenarkan tindakan penolakan masuknya etnis Han ke Xinjiang. Adanya ketegangan hubungan Han dan Uighur menambah buruk interaksi antar keduanya. Hal ini menciptakan sentimen terhadap asimilasi Han di Xinjiang. Bahkan, dalam pemerintahan di Xinjiang, masyarakat Uighur menduduki jabatan rendah, sedangkan para suku Han mendominasi jabatan di pemerintahan, seperti pimpinan komisi politik. Bahkan di sekolah umum, bentuk diskriminasi suku Han terhadap Uighur dilakukan oleh guru dan siswa dari suku Han, mereka cenderung melihat siswa Uighur sebagai siswa yang tidak teladan, tidak disiplin dan kasar. Hal ini kemudian, membuat masyarakat Uighur merasa tidak nyaman akan adanya dominasi dari suku Han di tempat tinggal mereka (Sinaga 2021).

3. *Keinginan Masyarakat Uighur untuk Merdeka dari Tiongkok*

Adanya konflik yang terjadi di Xinjiang, berawal dari keinginan merdeka masyarakat Uighur terhadap pemerintah Tiongkok. Adanya Dorongan dari beberapa oknum di Uighur untuk menjadikan Xinjiang sebagai wilayah yang merdeka, dengan tatanan pemerintahan yang benar-benar otonom. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah, dengan membentuk kelompok separatis Uighur atau disebut *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM). Gerakan ini merupakan kelompok separatis yang mulai dikenal pada tahun 2000. Didirikan oleh militan Uighur dan bermarkas di Xinjiang. Kemudian didaftarkan oleh perbendaharaan AS saat periode peningkatan kerjasama AS-Tiongkok dalam anti terorisme, setelah serangan 11 September 2001. Gerakan ini

didirikan oleh Hasan Mahsum, yang merupakan orang Uighur. *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM) juga telah terdaftar di Departemen Luar Negeri sebagai salah satu kelompok separatis yang cukup ekstrim. Gerakan ini selanjutnya dipimpin oleh Abdul Haq, yang tewas di Pakistan pada tahun 2010. Kemudian jejak ekstrim gerakan ini terbukti dengan adanya laporan dari media pemerintah Tiongkok, pada agustus 2014 yang menyatakan bahwa Memetuhut Memetrozi, yang merupakan salah satu pendiri ETIM telah terindoktrinasi di sebuah madrasah di Pakistan. Bahkan laporan tersebut juga menyatakan bahwa rencana pembentukan ETIM ini sudah dilakukan sejak tahun 1997. Ini menandakan bahwa adanya hubungan erat antara Pakistan dan militansi Uighur sejak lama (Xu 2014). Hal ini kemudian membuat pemerintah Tiongkok merasa perlu melakukan antisipasi terlebih dahulu, sebelum benar-benar menciptakan satu identitas yang sama.

Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang kekhawatiran tersebut, menjadi dasar tindakan keras yang terjadi di Xinjiang (Maizland 2021). Bai Jingfu, yang merupakan Asisten Sekretaris Partai Kementerian Keamanan Publik China (MPS) dengan sigap melakukan antisipasi untuk melakukan “Strike Hard” terhadap kerusuhan yang terjadi di Tiongkok. Sebab, Tiongkok dalam artikel 26 yang diterbitkan oleh Kantor Berita China dan Reuters, dan disimpulkan oleh MPS bahwa negara mereka akan terus menghadapi konflik internal dengan tingkat kejahatan yang tinggi, sehingga badan keamanan publik harus tetap waspada. Laporan yang disampaikan oleh Reuters juga mencatat bahwa ancaman teroris terbesar, yakni terletak di Xinjiang. Oleh sebab itu, pada 16 November 2005,

CEEC, Issues Roundtable on China's Changing Strategic Concerns: The Impact on Human Rights in Xinjiang, Dr.S. Frederick Starr menjelaskan, pemerintah harus melakukan “*Strike Hard Campaign*” yang mana akan berfokus pada kejahatan separatisme dan ekstremisme agama. Gerakan *Strike Hard Campaign* ini telah dijalankan sejak akhir 1990 dan kembali digunakan pada tahun 2005. Pada tahun 2006, Ismail Tiliwaldi yang merupakan Ketua pemerintahan di Xinjiang, menyatakan bahwa gerakan ini secara resmi digunakan untuk mempertahankan stabilitas Xinjiang. (Ministry of Public Security Urges Use of "Strike Hard" to Counter Social Unrest 2006).

Adanya pemicu tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, berasal dari respon masyarakat Uighur yang juga cukup kuat, yakni dengan melakukan tindakan-tindakan separatisme. Sehingga pemerintah Tiongkok merasa perlu mengatur tindakan tersebut dengan tegas, agar kejadian dimasa lampau tidak terulang kembali.

BAB 3

Upaya Penyeragaman Identitas dan Nasionalisme Tiongkok di Xinjiang

Pada bab ini, penulis akan menganalisis tindakan pemerintah Tiongkok melalui 4 kebijakan, yang akan dianalisis melalui perspektif dari Kanchan Chandra tentang proses pembentukan identitas etnis. Penulis mengarah pada salah satu pendekatan dari konstruktivisme politik identitas, yang mengatakan bahwa dunia yang selama ini kita anggap “alami” adalah sebuah hasil dari interaksi manusia yang mencoba membentuk satu interpretasi. Selain itu, proses yang terjadi pada saat interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah perubahan pada aktor yang dituju. Perlu adanya satu kekuatan yang mengikat dunia sosial secara fleksibel, namun juga bersifat kuat.

Kanchan Chandra mengartikan pembentukan identitas etnis sebagai hal yang lahir berdasarkan aturan, dan bukan oleh budaya, bahasa, sejarah atau wilayah yang sama (Chandra, *Constructivist Theories of Ethnic Politics* 2012). Terdapat ketidakstabilan dalam suatu identitas etnis, baik disebabkan oleh faktor keturunan atau sejarah. Faktor keturunan juga merupakan salah satu kendala utama terhadap adanya perubahan identitas. Maka dari itu, identitas merupakan sebuah ruang yang dipimpin dan bukan ditentukan. Jika sebuah identitas ditentukan, akan terdapat tumpang tindih atas pengakuan identitas suatu etnis. Dalam memandang konteks perubahan identitas, konstruktivisme dapat berubah dengan cepat atau lambat, dipengaruhi oleh adanya komponen yang berbeda dalam proses perubahan identitas tersebut (Chandra, *Constructivist Theories of Ethnic Politics*. 2012).

Pandangan diatas, sejalan dengan gambaran usaha pemerintah Tiongkok untuk mengupayakan pembentukan identitas dengan cara yang intens dan progresif, agar dapat tercipta suatu perubahan yang signifikan pada masyarakat Uighur. Yakni mengakui identitas mereka sebagai bagian dari Tiongkok. Penulis menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok berupa Pengawasan Massal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang, merupakan upaya yang efektif untuk mengatur pola interaksi dan juga tindakan setiap masyarakat Uighur. Selain itu, hal ini juga dapat menanamkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Uighur. Sebab, terdapat regulasi resmi yang mewajibkan masyarakat Uighur untuk menaati peraturan tersebut. Pemerintah Tiongkok sebagai lembaga yang berwenang mengatur masyarakatnya, memiliki hak untuk membuat kebijakan yang dapat menjaga keamanan negara serta mempersatukan seluruh etnis di Tiongkok untuk menjadi bagian utuh dari negara Tiongkok. Kebijakan tersebut yakni:

- Pengawasan Massal berupa *Sharp Eyes*, metode yang menjadi wadah dari kebijakan pemerintah Tiongkok. *Sharp Eyes* digunakan sebagai alat pemantau berupa kamera, dan mulai dioperasikan pada tahun 2015. Alat ini berfokus pada pengawasan di area publik perkotaan dan meluas ke wilayah pedesaan. Sistem pada pengawasan ini berupa pengawasan video publik, yang terlebih dahulu akan disesuaikan dengan identitas dari setiap individu atau identitas geografis, yang kemudian data tersebut akan dikirimkan ke “platform integrasi sumber daya masyarakat”. Lokasi utama tempat diletakkannya *Sharp Eyes*, yakni pada tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, hotel dan persimpangan jalan

utama. Kebijakan ini diberlakukan untuk “personil fokus” yakni individu yang mengajukan petisi kepada pemerintah dan mereka yang dicurigai terlibat dalam terorisme dan mengancam stabilitas negara (Peterson 2021).

- *Joint Operations Platform* atau Operasi Gabungan Terpadu (IJOP), sistem kerja dan pengawasannya hampir sama dengan *Sharp Eyes*, namun platform ini difokuskan di Xinjiang dan dengan extra penjagaan oleh militer Tiongkok. IJOP merupakan alat fusi data, yang mendeteksi kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan bentuk fisik individu, seperti wajah, tinggi badan dan golongan darah. Alat ini mampu melacak ponsel, kartu identitas dan juga kendaraan individu tersebut. Identitas Whatsapp dan Vpn sebagai alat komunikasi, juga masuk kedalam pengawasan. Platform ini dapat mengidentifikasi gerakan individu di Uighur sesuai dengan tingkat kemungkinan ancaman yang akan dilakukan (Peterson 2021).

- Kamp Advokasi, merupakan kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Chen Quanguo yakni merupakan ketua partai komunis di wilayah Xinjiang yang berasal dari etnis Han. Kamp Advokasi dibangun sejak tahun 2014 dan mulai meluas pada tahun 2017, seiring dengan munculnya pergerakan-pergerakan yang diduga sebagai sebuah tindakan separatisme. Pembangunan kamp tersebut sebagai tempat re-edukasi dan pendidikan kejuruan untuk memerangi gerakan separatism melalui, teori hukum, keahlian kerja,

dan pelatihan bahasa mandarin (Sudworth 2018). Pemberlakuan Kamp Advokasi secara masif terjadi pada tahun 2017, yang mana hal ini digambarkan dengan sebanyak 21% tindakan yang diduga mengarah pada gerakan ekstrimisme terjadi di Xinjiang. Adapun alasan penangkapan tersebut yakni, adanya tindakan menghasut kebencian etnis, memilih pertengkaran dan memprovokasi masalah etnis dan menonton juga mendengarkan konten ekstrimisme (Zidane 2020).

- Perencanaan Bahasa, dalam kebijakan ini pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk pola bahasa yang baru, dengan cara membangun dan merevisi sistem penulisan dan materi yang berhubungan dengan bahasa baru. Sistem kebijakan yang diberlakukan oleh Tiongkok secara responsif terhadap keadaan lokal di daerah minoritas, salah satunya yakni Uighur. Uighur menjadi masyarakat yang memiliki bahasa dominan, namun bersifat tidak stabil sebab memiliki jenis bahasa yang berbeda-beda. Masyarakat Uighur dominan menggunakan bahasa Turki, namun disisi lain juga terdapat pengakuan terhadap bahasa Chagatay. Bahasa Uighur digunakan oleh kelompok minoritas sebagai bahasa kedua, dan ketiga mereka dalam berkomunikasi. Permasalahan yang terjadi di Uighur, perihal identitas dan bahasa yang berbeda menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Tiongkok, adanya sikap penentangan dan konfrontasi yang membuat pemerintah turun tangan dan menciptakan alat negara yang bersifat

mutlak, yakni Undang-Undang. Adapun Undang-Undang yang membahas terkait perencanaan bahasa ini dikemukakan pada tahun 1980-an yang masih berlaku hingga sekarang. Status Pada Undang-Undang tentang perencanaan bahasa, terutama pada pasal 46 Undang-Undang kewarganegaraan yang berisikan “menjamin hak setiap warga negara untuk menuntut dalam bahasa lisan dan tulisan dalam kewarganegaraannya sendiri dalam melakukan litigasi” dan pada Undang-Undang tentang Otonomi Daerah bagi warga negara minoritas pada tahun 1984, dengan menekankan pada peningkatan otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya pada pasal 38 fokus kajiannya terletak pada dorongan terhadap sastra, seni, berita, penerbitan, penyiaran, film dan televisi. Aspek yang dipenuhi dalam Undang-Undang ini yakni untuk mendukung warisan sejarah dan budaya kebangsaan yang dikemas melalui aspek modern (Dwyer 2005, 8-12).

- Kelas Xinjiang Pada kebijakan ini, siswa-siswa di Xinjiang akan menghadiri sekolah berbentuk asrama di kota-kota yang mayoritas diduduki oleh suku Han. Kebijakan kelas Xinjiang ini telah mengumpulkan jumlah siswa yang meningkat dari 1000 pada tahun 2000, menjadi 10.000 pada tahun 2016. Program kelas Xinjiang ini telah diterapkan lebih dari 90 sekolah di 45 kota pada tahun 2015. Proses belajar awal yang diterapkan dalam program ini, berupa penguasaan materi selama satu tahun untuk persiapan pembelajaran di program kelas Xinjiang. Adapun materi yang harus dikuasai

selama persiapan yakni bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Kimia dalam bentuk kursus. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam memberikan pembekalan kepada siswa Uighur, sebelum masuk pada kelas Xinjiang, sehingga mereka dengan cepat beradaptasi dengan siswa lain, terutama dalam pendalaman Bahasa Mandarin dan Inggris. Pemberlakuan kebijakan ini, sebagai sebuah pemberdayaan masyarakat yang menjangkau semua rakyat Tiongkok untuk mendapatkan pendidikan. Selain sebagai sarana edukasi, pembentukan kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan status politik, ekonomi, dan budaya, untuk siswa yang berasal dari etnis minoritas, dalam hal ini siswa dari pedalaman Xinjiang. Sebagai etnis yang terbagi dalam beberapa perbedaan, adanya kebijakan ini juga sebagai strategi dari pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan komunikasi antara kelompok etnis dan mayoritas Han, serta mendorong adanya integrasi nasional, sebagai upaya jangka panjang untuk penyatuan antar etnis di Tiongkok (N. H. Su 2020).

4 kebijakan diatas menjadi cara yang dilakukan agar mencapai tujuan dari Tiongkok, untuk menyeragamkan identitas setiap etnis dan menerapkan nilai-nilai nasionalisme secara keseluruhan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut, berdasarkan pada pembentukan struktur identitas etnis yang dibahas oleh Kanchan Chandra. Bagaimana upaya pembentukan identitas tidak terjadi secara alami, namun terdapat beberapa cara untuk mewujudkannya. Dalam kasus untuk

menghadapi gerakan masyarakat Uighur, pemerintah Tiongkok perlu melakukan tindakan keras dan dilakukan dengan tiga cara, yakni oleh lembaga atau kognisi, dalam hal ini otoritas pemerintah Tiongkok dan diwujudkan melalui proses modernisasi dan kekerasan. Hal tersebut diwujudkan ke dalam 4 kebijakan, yakni Pengawasan Massal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang.

3.1 Pengaruh Modernisasi terhadap Identitas Masyarakat Uighur

Adanya modernisasi di suatu bangsa merupakan sebuah penciptaan budaya bersama di antara individu-individu yang hidup dalam batas-batas politik yang sama, kemudian juga sering disebutkan sebagai penerapan pada budaya nasional, dan etnis identitas secara bergantian. Modernisasi mempengaruhi identitas etnis, terutama melalui bahasa. Dalam proses modernisasi, bahasa digunakan sebagai alat untuk mendorong terciptanya kualitas individu, dalam menghadapi proses modernisasi tersebut. Dalam proses modernisasi, ada tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam penggunaan bahasa tertentu, hal ini dilakukan seiring dengan pemberlakuan modernisasi dengan tujuan standarisasi instrumen bahasa yang akan memudahkan proses industrialisasi dan komersial. Sehingga, penggunaan bahasa yang dapat memenuhi kaidah kebutuhan industri pada saat itu, akan menjadi bahasa yang utama digunakan. Pada proses modernisasi di Tiongkok, bahasa yang digunakan yakni Mandarin.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menciptakan interaksi dalam masyarakat. Menurut Konstruktivisme Politik Etnis, bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatur terbentuknya sebuah identitas di masyarakat. Pada aspek modernisasi ini, negara harus menciptakan sistem pendidikan terpusat, untuk mendidik warga negara dalam satu bahasa (Chandra,

Constructivist Theories of Ethnic Politics, 2012). Maka secara tidak langsung sebuah populasi yang berbeda akan berbicara pada satu standar bahasa yang sama, dan menjadi satu kebangsaan yang sama. Tiongkok sebagai negara yang memiliki cita-cita menjadi negara kuat dan maju, tentu saja harus menerapkan aspek ini kepada masyarakatnya. Perlu adanya kerangka berpikir yang sama, untuk melihat kemajuan aspek-aspek sosial. Perbedaan etnis yang mencolok, terutama pada masyarakat Uighur, menjadi hambatan pemerintah Tiongkok, untuk bergerak maju ke arah modernisasi, salah satu alasannya yakni bahasa yang berbeda antar masyarakat Uighur dan sebagian besar masyarakat Tiongkok. Maka dari itu, pemerintah Tiongkok menggunakan pendidikan untuk mengelola pola pikir siswa dan menanamkan gagasan terkait nilai-nilai nasionalisme. Selain itu sebagai alat komunikasi, penggunaan bahasa juga menjadi aspek yang penting dalam proses interaksi antar masyarakat, sehingga pemerintah Tiongkok memanfaatkan bahasa dalam proses modernisasi untuk menyeragamkan identitas di Xinjiang. Alasan penerapan bahasa yang sama, juga akan memudahkan pemerintah Tiongkok untuk mengolah Sumber Daya Alam di Xinjiang, berupa gas alam yang berpotensi terhadap kemajuan industrialisasi dan ekonomi Tiongkok.

Dalam kebijakan Penerapan Bahasa, dilakukan atas kerjasama antar pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk membentuk pola bahasa yang baru, dengan cara merevisi sistem penulisan yang lama. Hal ini dilakukan sebab, terdapat dominasi penggunaan bahasa Uighur di Xinjiang, terutama pada etnis minoritas. Pemerintah Tiongkok melihat bahwa, adanya keragaman etnis memiliki konsekuensi jangka panjang, tidak hanya untuk penggunaan bahasa tetap, namun juga pada identitas dari masyarakat Uighur itu sendiri. Pemerintah Tiongkok,

terkhusus pejabat pendidikan lokal kemudian membuat regulasi perencanaan bahasa dengan memanfaatkan pengajaran di sekolah berupa “kelas kebangsaan”. Regulasi ini lebih spesifik untuk mendukung adanya bahasa minoritas, namun tetap menjunjung tinggi penggunaan bahasa Mandarin (Dwyer 2005).

Pendidikan Dua Bahasa, menjadi cara bagi pemerintah untuk mewujudkan penerapan bahasa Mandarin di kalangan minoritas. Pendidikan “Dua Bahasa” diberlakukan di sekolah-sekolah Tiongkok, terutama di tempat-tempat sensitif seperti Xinjiang. Regulasi ini dipraktekkan dengan menempatkan bahasa Mandarin, sebagai bahasa utama untuk melakukan komunikasi atau menerima pelajaran, dan bahasa Uighur menjadi bahasa pengantar. Yu Zheng-Sheng yang merupakan pemimpin partai komunis, menyatakan bahwa pendidikan dua bahasa akan memastikan pelajar di Xinjiang mendapatkan pendidikan yang sama (Warga Uighur Didorong Belajar Bahasa Mandarin 2014). Perubahan struktur bahasa terjadi mulai pada tahun 2000. Terdapat perubahan bahasa pengantar dari bahasa Uighur ke bahasa Mandarin. Peraturan Dua Bahasa ini, mewajibkan guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahasa Mandarin. Hal ini berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Xinjiang (*Language and Securitization of Language Policy in Contemporary Xinjiang n.d.*). Bahkan, pada tahun 2004 hingga sekarang, pemerintah Xinjiang telah mengumumkan peraturan daerah bahwa bahasa Mandarin, menjadi bahasa pengantar utama di semua sekolah dasar dan sekolah menengah di Xinjiang. Dampak dari aturan tersebut, sekolah di Xinjiang mulai menggunakan Dua Bahasa dalam proses pengajaran, yang mana siswa Uighur juga secara tidak langsung harus mengikuti aturan tersebut (Yang 2016).

Regulasi perencanaan bahasan ini, merupakan sebuah konstruksi sosial yang coba dibangun oleh pemerintah Tiongkok, untuk menanamkan nilai nasionalismenya serta membentuk pola pikir yang maju pada masyarakat Uighur, yang terkesan masih sangat terisolasi. Masyarakat Uighur yang cenderung menggunakan bahasa Turk, sangat berbeda dalam pengucapan bahasa dari masyarakat Tiongkok, yang sebagian besar menggunakan bahasa Mandarin.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan, pemerintah Tiongkok juga mengupayakan penyeragaman identitas, melalui bahasa pada sektor universal dengan melibatkan lembaga dan bidang akademik. Terdapat perintah untuk menetapkan bahasa Mandarin sebagai bahasa universal. Hal ini dikeluarkan oleh Dewan Negara, Kabinet Tiongkok. Bahkan terdapat sebuah kampanye yang menyatakan bahwa pada tahun 2025, 85% warga Tiongkok akan menggunakan bahasa nasional. Penggunaan bahasa ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern di Tiongkok. Bahkan terdapat upaya untuk memastikan penggunaan bahasa Mandarin dalam pengucapan secara lisan dan tulisan secara umum, dan digunakan sebagai bahasa resmi lembaga pemerintah. Selain itu, penerapan bahasa ini juga digunakan dalam pendidikan, berita, publikasi seperti film, televisi dan layanan publik. Kebijakan bahasa ini, juga berlaku kepada para pejabat untuk menguatkan peran bahasa Mandarin di dunia internasional dan pengaruh orang Tiongkok di akademisi, organisasi internasional dan pertemuan global (*China Says 85% of Citizens Will Use Mandarin by 2025 2021*).

Berdasarkan tindakan-tindakan diatas, maka muncul persepsi bahwa bahasa mandarin merupakan bahasa yang modern dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat Tiongkok demi kepentingan ekonomi dan sosial. Kanchan Chandra

menjelaskan bahwa modernisasi memiliki tujuan untuk menciptakan gagasan bahwa identitas tertentu dianggap lebih modern, dalam hal ini penggunaan bahasa mandarin di Tiongkok dan upaya penyeragaman identitas melalui bahasa Mandarin di Xinjiang. Pentingnya penggunaan bahasa Mandarin dikalangan masyarakat Uighur, berkesinambungan dengan meningkatnya industrialisasi serta roda perekonomian, terutama di Xinjiang yang memiliki SDA melimpah. Penggunaan bahasa Mandarin dalam dunia kerja juga sangat penting, masyarakat Uighur yang cenderung tertinggal secara budaya harus berusaha mengimbangi kemajuan dalam proses modernisasi. Apalagi Xinjiang sangat berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Tiongkok. Pemahaman terhadap bahasa Mandarin di Uighur dapat memicu adanya kemajuan kualitas diri masyarakat Uighur itu sendiri, serta dapat memajukan perekonomian mereka. Hal ini disebabkan banyaknya kerjasama ekonomi antar Tiongkok yang berpusat pada kegiatan industrialisasi di Xinjiang, dengan investor asing sehingga perlu adanya peranan masyarakat dalam satu bahasa yang sama yakni Mandarin. Adanya anggapan bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang modern karena berguna bagi setiap aspek dalam masyarakat, memunculkan persepsi tentang bahasa nasional Tiongkok menjadi aspek yang paling dekat dengan modernisasi.

Pentingnya peran bahasa dalam mendorong majunya sebuah negara dalam modernisasi, membuat pemerintah mengupayakan kebijakan ini, untuk menerapkan satu alat komunikasi yang sama demi menciptakan interaksi yang sejalan. Dengan menggabungkan satu bahasa yang sama dalam setiap identitas etnis, akan menciptakan representasi. Menurut Chris Barker, bahwa representasi dimaknai sebagai bagian yang dikonstruksi secara sosial. Yang mana setiap prosesnya dibuat

oleh kita dan untuk kita. Adapun tujuan dari penciptaan suatu representasi yang sama yakni, menguatkan peran identitas. Seseorang dikatakan berada dalam kebudayaan yang sama, jika memiliki budaya yang sama, menggunakan bahasa yang sama serta terdapat nilai-nilai yang sama (*The First International Seminar & Roundtable Meeting “Professional Chinese Teaching” in Southeast Asia 2018*). Penerapan kebijakan bahasa ini, dapat menjadi satu senjata yang kuat bagi pemerintah Tiongkok, untuk mempertahankan identitas dan nasionalismenya secara utuh, serta mengembangkan ekonomi dan industrialisasi negaranya.

3.2 Peran Lembaga Kognisi dalam Penyeragaman Identitas Masyarakat Uighur

Sebagai tonggak berjalannya suatu negara, pemerintah memiliki kewajiban menjamin kesejahteraan dan juga keamanan seluruh masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintahan disuatu negara memiliki wewenang untuk mengedepankan prioritas yang sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk mengatur setiap tindakan masyarakatnya, dalam sebuah regulasi atau kebijakan. Dalam kasus masyarakat Uighur, pemerintah Tiongkok telah mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengawasi, dan mengatur pergerakan masyarakat Uighur. Serta, membangun penerimaan nilai-nilai nasionalisme untuk membentuk identitas yang sama. Pemerintah Tiongkok melakukan berbagai cara untuk melindungi wilayah Xinjiang dari adanya bentuk invasi dan juga gerakan ekstrimisme, serta mengatur pola sosial di Xinjiang agar dapat sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga berupaya untuk mempertahankan keamanan teritorialnya. Tiongkok mengukur keamanan teritorialnya melalui perbatasan negara. Ketika perbatasan

tersebut terancam, maka negara harus memusatkan upaya keamanan pada wilayah tersebut (Fithriana 2020, 117-120). Maka dari itu, Xinjiang sebagai wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan dan juga perbatasan antara wilayah timur dan barat, sangat diperhatikan oleh pemerintah Tiongkok, sebab menjadi salah satu tumpuan ekonomi karena merupakan jalur *Silk and Road*, serta sebagai wilayah yang memiliki SDA yang melimpah, perlu adanya pengawasan khusus di wilayah ini. Sebab dianggap masih rentan terpapar radikalisme, yang akan menyebabkan rentannya keamanan nasional Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok mengupayakan pembentukan identitas pada masyarakat Uighur, melalui kebijakan yang dibuat secara tegas. Pemerintah Tiongkok tidak melakukan kebijakan tersebut sendiri, namun bekerjasama dengan militer dan juga institusi pendidikan, yakni sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pemerintah memegang peranan penting terhadap upaya penyatuan gagasan ini. Adanya kekuatan yang dipegang oleh pemerintah menurut konstruktivisme yang di gagas oleh Kanchan Chandra, sebagai sebuah lembaga yang dapat menciptakan suatu identitas di masyarakat. Adapun beberapa aspek dalam proses pembentukan identitas melalui lembaga kognisi, yakni untuk mewujudkan aturan pokok, serta untuk membentuk batasan pada masyarakat, sebagai upaya untuk mengontrol pembentukan identitas.

3.2.1 Pembentukan Aturan Pokok untuk Menciptakan Interpretasi

Dalam aspek ini, Pemerintah Tiongkok memiliki peran untuk menciptakan aturan pokok yang dapat mengatur struktur sosial dalam negaranya, salah satunya yakni kelas Xinjiang. Konstruktivisme dalam politik identitas, memiliki pandangan bahwa sebuah struktur dalam dunia, merupakan sesuatu yang tidak terjadi begitu

saja, sehingga perlu adanya aturan yang mengatur seluruh tindakan manusia. Pembentukan identitas etnis juga memiliki sifat yang tidak tetap, sehingga perlu adanya instrumen tetap untuk menciptakan identitas yang jelas dalam suatu negara. Sebagai sebuah teori yang berlandaskan pada struktur yang dibangun dalam dunia sosial, konstruktivisme memberikan gambaran bahwa dunia sosial adalah sesuatu yang dapat berubah dan dapat di konstruksi. Adanya aturan tersebut, akan membangun interpretasi yang sama dalam memandang dunia sosial. Aspek ini yang terdapat pada upaya pemerintah Tiongkok untuk menerapkan kebijakan Penerapan Bahasa dan Kelas Xinjiang. Adanya kebijakan ini sangat berdampak pada proses internalisasi nilai-nilai atau pendalaman nasionalisme Tiongkok. Tentu saja tidak bertumpu pada masyarakat saja, dalam kebijakan ini lembaga memiliki peran penting. Berikut beberapa kebijakan yang dikelola oleh pemerintah dan melibatkan beberapa instansi.

Pada salah satu kebijakan, yakni Kelas Xinjiang, pemerintah mengambil langkah dengan menggunakan edukasi, sebagai upaya penanaman nasionalisme Tiongkok. Kerjasama dari institusi pendidikan ini merupakan salah satu cara yang efisien untuk menyatukan gagasan dan pemikiran untuk menciptakan identitas etnis. Sebab, target dari regulasi ini yakni siswa-siswi Sekolah Menengah Atas, yang hendak melanjutkan pendidikan. Pada kebijakan ini, siswa-siswi tersebut akan dimasukkan kedalam asrama terlebih dahulu, sebelum benar-benar mulai melakukan pembelajaran di sekolah. Di asrama tersebut, mereka akan diajarkan ilmu-ilmu dasar, seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, yakni dengan cara mendanai siswa sekolah menengah untuk dimasukkan ke asrama. Sebagian besar dari siswa tersebut berasal dari etnis minoritas, salah satunya Uighur. Secara umum kebijakan ini berupa penyediaan fasilitas berupa sekolah dan universitas untuk menyatukan komunikasi antar kelompok etnis dan mendorong adanya integrasi nasional. Kebijakan lainnya yang lebih spesifik terdapat pada pemberian kurikulum di universitas yang berpusat pada nilai-nilai Tiongkok. Salah satunya yakni Apresiasi Lukisan dan Kaligrafi Tiongkok. Awalnya kursus ini mendalami semua budaya yang ada Tiongkok, namun secara khusus hanya berfokus pada kaligrafi kelompok etnis Han dan tidak merepresentasikan karya dari Uighur sedikitpun. Hal ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa Uighur yakni Aliye (nama samaran), yang berkuliah di salah satu Universitas di Tiongkok yang diwawancarai dan hasil wawancara tersebut dimasukkan kedalam artikel *Where The World Comes to Learn Qualitative Research*. Aliye juga mengatakan bahwa semua metode pembelajaran dan pengaturan kurikulum bahkan bahan ajar di Universitas, berpusat pada budaya Han yang dominan. Bahkan, ketika Aliye menghadiri kelas “Penghargaan Lingkungan” profesor mereka akan lebih detail menjelaskan tentang gaya arsitektur Tiongkok, yakni lanskap taman di hilir sungai Yangtze. Namun ketika membahas tentang arsitektur Islam Timur Tengah, professor akan menekankan bahwa gaya arsitektur di Xinjiang sangat dipengaruhi oleh arsitektur islam dan itu merupakan pengaruh dari faktor eksternal.

Adanya proses pengajaran yang cenderung terlihat tidak adil, nyatanya tidak menurunkan minat mahasiswa yang ingin mendaftar di kelas Xinjiang tersebut. Kelas Xinjiang sudah mulai beroperasi selama 20 dekade, dengan jumlah

siswa yang terdaftar meningkat pada tahun 2016, sebanyak 10,000. Lebih dari 90 sekolah di Tiongkok memiliki program kelas Xinjiang pada tahun 2015. Regulasi ini dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dengan memanfaatkan pola pikir siswa sedini mungkin, untuk dikenalkan dengan nilai-nilai dasar nasionalisme Tiongkok. Masyarakat Uighur yang secara ekonomi jauh tertinggal dari kebanyakan masyarakat Tiongkok, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, sehingga jalan satu-satunya agar dapat merubah status sosial keluarga, anak-anak tersebut di sekolahkan di sekolah Xinjiang yang dibangun oleh pemerintah Tiongkok. Bukti nyata yang dirasakan orang tua salah satu siswa Uighur yang juga melanjutkan pendidikan di kelas Xinjiang, yakni Yue. Yue berkata dalam wawancara *Where The World Comes to Learn Qualitative Research*, bahwa anaknya telah mendapat pengalaman yang baik serta, dengan waktu yang singkat dapat bekerja di X College. Yue kemudian membandingkan kualitas anaknya yang di masukkan ke kelas Xinjiang dengan teman-teman SMP-nya yang tidak melanjutkan sekolah. Maka dari itu, adanya pernyataan dari salah satu orang tua siswa ini menjadi bukti bahwa siswa kelas Xinjiang memiliki peluang kerja yang lebih banyak, karena kemampuan bilingual dan kualitas pribadi yang sudah ditanamkan sejak berada di kelas Xinjiang (X. Su 2020).

Dari beberapa tindakan di atas dapat dikatakan bahwa langkah penyeragaman identitas kepada masyarakat Uighur melalui kelas Xinjiang, secara tidak langsung memanfaatkan upaya pembentuk karakter dalam masing-masing diri siswa tersebut. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengajaran di sekolah melalui kurikulum, penempatan masyarakat Uighur ke asrama dan penggunaan bahasa Mandarin dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pengajaran tersebut dapat

menjadi rujukan dari pembentukan karakter di Xinjiang. Dengan adanya pembentukan karakter tersebut, berarti memberikan pemahaman kepada mereka tentang struktur nilai yang ada di Tiongkok. Sejalan dengan tujuan dari pemerintah Tiongkok bahwa upaya penyeragaman identitas dapat mencapai integrasi nasional. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok, untuk memberikan penanaman nilai nasionalisme secara keseluruhan pada siswa, melalui kurikulum sekolah. Adanya pendekatan melalui kelas Xinjiang dengan menyediakan sekolah dan universitas akan mendorong komunikasi antar masyarakat Uighur dan Han. Setelah terbentuk komunikasi yang baik kemudian akan menciptakan interaksi serta secara tidak langsung akan membentuk karakter masyarakat Uighur menjadi bagian dari Tiongkok. Hal ini akan untuk menciptakan integrasi nasional di Tiongkok. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok, untuk memberikan penanaman nilai nasionalisme secara keseluruhan pada siswa, melalui kurikulum sekolah. Adanya pendekatan melalui kelas Xinjiang dengan menyediakan sekolah dan universitas akan mendorong komunikasi antar masyarakat Uighur dan Han serta untuk menciptakan integrasi nasional (X. Su 2020).

3.2.2 Terdapat Pemaksaan Batasan dalam Konteks Tertentu

Demi mewujudkan perubahan identitas yang signifikan, terdapat hal yang harus dilakukan secara konsisten. Adanya pembentukan aturan yang tegas, dengan cara pemaksaan, akan merubah aspek-aspek identitas etnis secara perlahan, namun bersifat jangka panjang (*Chandra, Constructivist Theories of Ethnic Politics 2012*). Hal ini dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam upaya menyergamkan identitas di Tiongkok. Salah satunya pada pembatasan kegiatan beragama, budaya serta

nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Uighur. Konstruktivisme dalam politik identitas membahas bahwa tindakan dari lembaga kognisi yakni menyebarkan secara sengaja terkait gagasan identitas yang ada di Tiongkok. Hal ini bertujuan mengubah gagasan individu melalui pengetahuan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengupayakan masuknya identitas ke Uighur sangat beragam. Salah satunya yakni, para pejabat Tiongkok membagi-bagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah masyarakat Uighur yang beragama Islam pada saat bulan suci Ramadhan, serta memaksa mereka untuk tidak berpuasa. Adanya tindakan ini dikecam oleh masyarakat Uighur, namun demikian Pemerintah Tiongkok berdalih bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya (Saragih 2016). Larangan berpuasa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok menjadi upaya mengurangi budaya Uighur di Xinjiang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Uighur sangat dekat dengan kelompok teroris, yang dikelompokkan dalam ETIM sehingga untuk mengantisipasi pergerakan yang masif, semua kegiatan yang bertujuan mempromosikan agama ekstrim ini akan di larang. Dengan adanya upaya tersebut, pemerintah Tiongkok secara perlahan akan mendominasi identitas di Xinjiang dan mengurangi budaya Uighur.

Nilai yang diupayakan oleh pemerintah Tiongkok juga melalui promosi ideologi Yakni Zhongguo Meng. Zhongguo Meng juga dapat diartikan sebagai konsep politik buatan yang digunakan untuk mendukung asimilasi minoritas kedalam etnis Han. Konsep ini juga menekankan pada membenaran ideologi yang dianut oleh Tiongkok (Sinaga 2021).

Dari analisis diatas, sebagai implementasi bahwa peran lembaga yang dikatakan oleh Kanchan Chandra sebagai penerapan konstruktivisme dalam pembentukan identitas etnis adalah hal yang efektif. Lembaga sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur sistem sosial, memberikan dampak besar terhadap pembentukan identitas etnis, yakni Uighur. Pemerintah Tiongkok yang memiliki fokus untuk menjadikan negaranya, sebagai negara yang memiliki kekuatan besar dan diakui oleh seluruh dunia, harus melakukan tindakan tegas dan tetap mempertahankan nilai-nilai nasionalismenya. Salah satunya diwujudkan dalam upaya antisipasi terhadap gerakan separatisme yang mengancam keamanan negara, serta pembentukan identitas etnis sebagai bentuk mempertahankan nasionalisme, untuk membangun negara yang kuat.

3.3 Pengaturan Tatanan Sosial Masyarakat Uighur melalui Kekerasan

Upaya lainnya dalam proses pembentukan identitas yakni melalui pengawasan dan pengaturan pola kehidupan sosial masyarakat Uighur. Hal ini seringkali disebutkan sebagai sebuah bentuk penerapan kedisiplinan dan juga pembentukan karakter. Menurut Kanchan Chandra, upaya pembentukan identitas melalui kekerasan, dapat menimbulkan aktivasi tertentu. Aktivasi etnis tentu saja dipengaruhi oleh adanya diskusi masa lalu terhadap etnis tersebut. Masyarakat Uighur yang memiliki sejarah masa lalu terkait pemberontakan dan juga gerakan ekstrimisme, teridentifikasi sebagai etnis yang dapat diatur melalui kekerasan, sebab memiliki sejarah masa lalu yang menentang pemerintah Tiongkok. Sehingga pemerintah Tiongkok perlu melakukan tindakan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama pada masa lalu.

Adapun pembentukan identitas etnis melalui kekerasan, dapat membentuk:

1. Sarana untuk menciptakan kekompakan diantara para anggota kategori identitas etnis yang ada sebelumnya.
2. Sarana bagi pihak untuk mengaktifkan kategori identitas etnis dan mengawasi batasnya.
3. Kekerasan dapat mempengaruhi perubahan identitas etnis dengan mengubah makna dan praktik (*Chandra, Constructivist Theories of Ethnic Politics. 2012*).

Maka dari itu, tiga poin diatas menjelaskan alasan pemerintah Tiongkok untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat Uighur, semata untuk mengatur pola kehidupan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengupayakan langkah yang tegas dalam menyesuaikan taktik dengan tindakan sosial yang terjadi. Dalam hal ini, kekerasan yang dimaksudkan bukan kekerasan secara langsung terhadap masyarakat, melainkan dengan menggunakan kekuatan militer untuk menekan masyarakat dan aturan tegas. Pengawasan ketat oleh militer, dilakukan secara skala besar terutama di Xinjiang yakni pada kota-kota tertentu yang dianggap strategis (Fithriana 2020).

Upaya pembentukan identitas etnis melalui kekerasan juga ditekankan pada pembentukan aturan, yang nantinya akan berdampak pada kepatuhan terhadap otoritas yang memimpin. Pemerintah Tiongkok mencoba mengatur masyarakatnya dengan menindaklanjuti beberapa oknum yang dicurigai dapat menyebarkan paham ekstrimisme ke wilayah Xinjiang. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengirim mereka ke Kamp Advokasi untuk diberikan pemahaman dan pelatihan kejuruan, hal ini dilakukan sebab pemerintah Tiongkok merasa bahwa oknum tersebut, masih rentan terpapar paham ekstrimisme dan mempunyai peluang

untuk melakukan pemberontakan atau bahkan menyebarkan paham tersebut secara luas, sehingga diterapkannya kebijakan berupa Kamp Advokasi. Kamp yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok sebagai tempat re-edukasi dan pendidikan kejuruan untuk memerangi gerakan separatis melalui, teori hukum, keahlian kerja, dan pelatihan bahasa mandarin (Sudworth 2018). Pada pembentukannya, pemerintah Tiongkok bertindak sangat tegas untuk mengupayakan penanaman nilai-nilai diatas, sebagai bentuk pengendalian terhadap masuknya gerakan separatisme di Tiongkok. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, untuk memberikan pemahaman terkait nilai-nilai nasionalisme Tiongkok dengan membangun Kamp Advokasi, merupakan penanganan yang sesuai dengan sejarah pemberontakan masyarakat Uighur, yang memiliki peluang untuk melakukan gerakan separatisme yang sama, seperti masa lalu. Sehingga pemerintah Tiongkok memilih melakukan antisipasi dengan memberlakukan kebijakan *Strike Hard Campaign*. Kekerasan yang dimaksudkan disini adalah sebuah upaya penanganan ekstra terhadap perlindungan keamanan di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok, tidak melakukan kekerasan secara langsung kepada masyarakat. Sebab secara tegas bahwa Tiongkok telah meratifikasi dan berpartisipasi dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* pada tahun 1998 (*United Nations Treaty Collections, 1966*) dan *International Human Rights* (Husnah 2016). Adanya perjanjian tersebut, memberikan tanggung jawab secara langsung kepada Tiongkok untuk mempertahankan hak-hak sipil dan juga politik masyarakatnya. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakatnya. Sehingga hal ini memberikan batasan kepada

pemerintah Tiongkok, untuk tidak melakukan kekerasan secara langsung dan pelanggaran ham lainnya.

Kebijakan lainnya berupa upaya yang serius dari pemerintah Tiongkok, untuk membentuk struktur sosial yang baik. Salah satunya dengan mengawasi pergerakan masyarakat Uighur. Dalam hal ini pemerintah Tiongkok, membatasi ruang gerak dari masyarakat Uighur dengan cara melakukan kebijakan Pengawasan Massal. Pada kebijakan ini pemerintah Tiongkok melakukan pengawasan melalui kamera pengintai (*sharp eyes*) dan mengandalkan keterlibatan militer untuk melakukan pemantauan terhadap setiap pergerakan masyarakat Uighur. Identitas masyarakat Uighur, sosial media yang digunakan seperti Whatsapp dan Vpn, kemana masyarakat Uighur bepergian, akan di cek secara detail untuk menghindari adanya gerakan yang mencurigakan di Xinjiang. Selain itu, bentuk pembatasan dalam beragama seperti larangan melakukan kegiatan beribadah menurut agama masing-masing. Detail kebijakan tersebut berupa larangan melakukan ritual keagamaan seperti Shalat dan berpuasa pada bulan suci Ramadhan, serta terdapat penjagaan ketat yang mana masyarakat Uighur dilarang untuk memasuki masjid dan berdoa (Saragih 2016). Pembatasan terhadap kurikulum pendidikan dan juga budaya asli Uighur serta pengawasan ketat sekolah-sekolah agama turut dilakukan oleh pemerintah Tiongkok (Sinaga 2021).

Bentuk regulasi ini, menjadi acuan bagi pemerintah Tiongkok untuk mengatur pembentukan pola sosial dan pengawasan di Xinjiang. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Uighur dari ancaman pihak luar, dan juga sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak yang bukan berasal dari Tiongkok. Upaya ini sejalan dengan konsep dari

konstruktivisme, yang mana mengedepankan adanya pembentuk identitas yang sama pada setiap individu melalui sebuah regulasi atau pengawasan, yang diatur melalui pengaturan sosial dan agar membentuk konstruksi di masyarakat. Dengan menciptakan sebuah aturan dalam masyarakat, lebih mudah untuk membentuk gagasan yang nantinya akan menciptakan satu identitas yang sama.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, sejalan dengan maksud dari konstruktivisme dalam politik identitas. Yang mana, terdapat beberapa persoalan pembentuk identitas yang harus disesuaikan dengan pola masyarakat yang ada, yakni masyarakat Uighur. Proses pembentuk identitas melalui lembaga dan dengan cara kekerasan, akan memberikan dampak pada proses pembentuk identitas secara perlahan namun bersifat jangka panjang. Menurut Kanchan Chandra bahwa bentuk kekerasan dapat mempengaruhi perubahan identitas etnis dengan mengubah makna dan praktik. Adanya bentuk pemaksaan dan konsekuensi ketika melanggar aturan dari pemerintah Tiongkok, akan mendorong keharusan untuk menaati aturan tersebut. Kemudian, secara tidak langsung akan menciptakan konstruksi sosial yang mengarah pada satu identitas yang sama, yakni sebagai bagian dari masyarakat Tiongkok. Kedua cara pembentuk identitas tersebut berfokus untuk mengedepankan pembentuk struktur manusia melalui interaksi yang nyata.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok mulai dari kebijakan pengawasan terhadap masyarakat Uighur dan juga beberapa upaya indoktrinasi melalui pemahaman nilai-nilai dasar nasionalisme, merupakan proses yang diupayakan untuk membentuk karakter sosial dari masyarakat Uighur di Xinjiang. Terbentuknya satu gagasan yang sama pada masyarakat Uighur akan memudahkan

proses interaksi dan pembentukan dunia sosial yang kondusif, sebab masyarakat Uighur dan masyarakat Tiongkok lainnya telah memiliki satu identitas yang sama, yang dapat memudahkan pemerintah Tiongkok untuk mengatur arah tatanan sosial di Tiongkok. Selain itu dengan terciptanya identitas yang sama, pemerintah Tiongkok dapat dengan mudah membentuk suatu negara yang kuat baik dalam perekonomian, sosial dan juga politik. Pemerintah Tiongkok dapat dengan leluasa mengontrol segala sumber daya yang ada dalam negaranya, terutama yang ada di daerah Xinjiang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dalam mengupayakan kebijakan-kebijakan di atas kemudian membuahkan hasil yang signifikan. Kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat Uighur cenderung mulai stabil dan terlepas dari pengaruh ekstrimisme secara perlahan. Selain itu, kualitas masyarakat Uighur dalam bidang pendidikan juga mulai meningkat, hal ini dibuktikan dengan testimony dari beberapa orang tua siswa kelas Xinjiang yang mengaku bahwa anaknya telah berhasil memajukan ekonomi keluarga dengan kualitas diri mereka setelah belajar di kelas Xinjiang (Rasyid,2019). Pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, masyarakat Uighur juga akan mendapatkan dampak positif dari adanya penyatuan identitas ini. Kehidupan mereka akan terjamin secara ekonomi dan sosial, serta tidak merasa terintimidasi karena perbedaan yang mereka miliki. Sehingga terciptanya kehidupan sosial yang sejahtera bagi seluruh masyarakat Tiongkok

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Uighur merupakan etnis yang berada di Xinjiang dan merupakan etnis minoritas, dengan berbagai polemik didalamnya. Permasalahan terkait Uighur ini kemudian berdampak pada pandangan dunia internasional terhadap upaya tindakan pemerintah Tiongkok, yang dianggap melampaui batas dan melanggar hak-hak masyarakat Uighur di Xinjiang. Namun, pemerintah Tiongkok memiliki alasan tersendiri, terkait tindakan tegas yang diberikan kepada masyarakat Uighur. Masyarakat Uighur yang memiliki sejarah sebagai etnis ingin merdeka dari Tiongkok. Cara yang dilakukan yakni dengan melakukan pemberontakan dan gerakan ekstrim seperti pengeboman, merusak fasilitas umum dll. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur tersebut cukup meresahkan keamanan di Tiongkok.

Melihat kejadian tersebut, pemerintah Tiongkok bergerak secara cepat untuk menindaklanjuti pergerakan yang akan memberikan dampak signifikan terhadap keamanan dan keutuhan negaranya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kebijakan tegas berupa aturan-aturan terhadap kehidupan sosial, terutama di Xinjiang. Adapun kebijakan tersebut yakni Pengawasan Massal dalam hal ini pembatasan penggunaan atribut dan pengawasan menggunakan *Sharp Eyes*, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang. Dalam kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Tiongkok dengan sengaja membentuk gagasan dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme Tiongkok, melaleuca pendekatan sosial dan juga upaya tegas yakni berupa aturan dan pendidikan. Tujuan kebijakan tersebut,

yakni untuk mengantisipasi gerakan teror, mengendalikan struktur sosial di Xinjiang dan membentuk identitas serta nasionalisme, untuk mewujudkan penyeragaman etnis di Tiongkok.

Upaya tersebut diimplementasikan berdasarkan pada konsep dari Kanchan Chandra tentang Konstruktivisme dalam politik identitas. Pembentukan identitas yang dimaksud oleh Kanchan Chandra dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni, Modernisasi, Lembaga/kognisi, kekerasan, perlindungan, hibriditas. Penulis menggunakan tiga dari lima aspek tersebut yakni Modernisasi dalam hal ini relevan dengan kebijakan Penerapan Bahasa, Lembaga/kognisi yang menggambarkan kebijakan Kelas Xinjiang dan Pengawasan Massal dan Kekerasan yang berkorelasi dengan kebijakan dari pemerintah Tiongkok, yakni Pembangunan Kamp Advokasi dan Pengawasan Massal. Empat Kebijakan yang dijelaskan oleh penulis merupakan upaya tegas dan konsistensi dari pemerintah Tiongkok untuk melakukan penyeragaman identitas di negaranya. Tiongkok melalui kebijakan yang tegas terhadap masyarakat Uighur, berusaha mengedepankan penyeragaman nilai-nilai nasionalismenya untuk mewujudkan negara yang memiliki satu identitas yang kuat di mata dunia. Hal ini akan berdampak pada kekuatan Tiongkok di dunia internasional sesuai tujuan awal yakni menjadi negara besar yang berguna bagi dunia.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah Tiongkok melakukan tindakan kepada masyarakat Uighur, berupa aturan-aturan tegas melalui kebijakan Pengawasan Massal, Kamp Advokasi, Perencanaan Bahasa dan Kelas Xinjiang. Yang mana kebijakan-kebijakan tersebut

merupakan upaya dari pemerintah Tiongkok untuk menyeragamkan identitas di negaranya.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, salah satunya yakni hanya menganalisis dalam satu sudut pandang saja, yakni sudut pandang pada kepentingan Tiongkok. Maka, dalam hal ini penulis merekomendasikan perlu adanya penelitian lebih lanjut, yang membahas secara eksplisit tentang respon dari masyarakat Uighur, selaku etnis yang diberikan kebijakan tegas serta cenderung membatasi ruang gerak mereka. Selain itu juga terkait gerakan separatisme yang dilakukan oleh masyarakat Uighur, berupa pengeboman dan pemberontakan, perlu adanya penelitian yang membahas terkait gerakan yang dipelopori oleh *East Turkestan Islamic Movement (ETIM)* seperti alasan pembentukan ETIM, siapa dibalik gerakan tersebut serta aliansi gerakan teror yang terlibat. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat menilai dari berbagai sudut pandang terhadap kasus yang terjadi antar masyarakat Uighur dan Pemerintah Tiongkok tersebut. Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih persepsi di masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaliah, H. 2020. "Upaya Pemerintah Cina Dalam Mengatasi East Turkestan Islamic Movement (ETIM) Pasca Serangan Tiananmen Square. ." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 8*.
- Ardinda, Anugerah Yukka Asmara dan Ade Afrilia. 2020. "Setting Kelembagaan Pemerintah Daerah: Perbandingan antara Indonesia, Pakistan dan China." *Jurnal Pengembangan Daerah Page 7*.
- Arkadiy A. Eeremin, Oleg K. Petrovich-Belkin. 2019. ""The War on Drugs Concept as the basis for Combating Drugs on the Western Hemisphere." *Central European Journal of International and Security Studies 34*.
- Aryadevi, Cintya. 2016. "Analisis Kebijakan War on Drugs Amerika Serikat di Kolombia." *Jurnal Hubungan Internasional (Jurnal Hubungan Internasional Vol. 9, No. 1) 1*.
- Bergen. 2011. *Ghulja Massacre in China: fourteen years after*. 26. Accessed 7 25, 2022. <https://humanrightshouse.org/articles/ghulja-massacre-in-china-fourteen-years-after/>.
- Boesche, Roger. 2003. "Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India." *The Journal of Military History, Vol. 67, No. 1 18*.
2016. *Bom Bunuh Diri Meledak di Kedutaan China di Kyrgyzstan*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bureau of International Narcotics Matters, U.S. Department of State. 1990. *Bureau*

- of International narcotics control strategy*. Washinton Dc: INCSR.
- Bysyuk, Veronika. 2010. *“Impact of 9/11 Terrorist Attacks on US and International Tourism*. Wina: Modul Vienna University.
- C. A. Youngers, E. Rosin. 2005. *The U.S. “War on Drugs” : Its Impact in Latin America and the Caribbean*. United State: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Chandra, K. 2012. *Constructivist Theories of Ethnic Politics*. New York: United States of America by Oxford University Press.
- . 2012. *Constructivist Theories of Ethnic Politics*. New York: United States of America by Oxford University Press.
2021. *Chart of the day: Xinjiang's population rises by 18.5 percent from 2010 to 2020*. CGCTN News.
- Chaudhuri, D. 2010. *Minority Economy in Xinjiang-A Source of Uyghur Resentment*. China: China Report.
- Check. 1995. *“The Successes and Failures of George Bush’s War on Drugs”*. Juni Monday. <http://tfy.drugsense.org/bushwar.htm>.
2021. *China Says 85% of Citizens Will Use Mandarin by 2025*. U.S News.
- n.d. *China's Autonomous Regions*. Accessed 7 28, 2022. http://www.chinatoday.com/city/china_autonomous_regions.htm.
- n.d. *Chinese Arts & Music*. Accessed 7 26, 2022. <https://www.tota.world/article/1144/>.
2017. *Cina Larang Warga Xinjiang Pelihara Janggut Panjang dan Jilbab di Ruang Publik*. Report, BBC News Indonesia.
- CNN. 2018. *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*. Indonesia: CNN.
- Coplin, D. W. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis Edisi*

Kedua. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

2017. *Core socialist values*. 10 12. Accessed 7 25, 2022.

https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017-10/12/content_33160115.htm.

Coyne, Christopher J. 2016. "The War on Drugs in Afghanistan, The Independent Review ." *Journal of Political Economy* 99.

Crandall, Russel. 2001. *Explicit Narcotization: US Policy toward Colombia during the Presidential*. Davidson College: Department of Political Science.

Davenport, Sarah. 2011. *US government's war on drugs*. London: The guardian. .

Dewi, Nevy Rusmarina. 2021. "Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur di Cina." *Ijtimaiah: Journal of Social Science Teaching, Vol. 4 No. 1*.

Domingues, Jorge I. 1999. *The United State and Latin America: US-Latin Americans Relations During The Cold-War And Its Aftermath*. London: Harvard University.

Dwyer, A. M. 2005. "The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity." *Language Policy and Political Discourse*. East-West Center Washington.

Edikresnha, N.N. 2012. "Implementasi Konsep Nasionalisme China di Era Globalisasi terhadap Etnis Minoritas Uighur di Xinjiang pada tahun 2001-2010."

Editors, History.com. 2019. *War on Drugs*. December 17. <https://www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs>.

Feng, Emily. 2022. *Uyghur kids recall physical and mental torment at Chinese boarding schools in Xinjiang*. Report, npr.

Ferreira, R. H. 2015. "The war on drug addiction." *European Journal of Social*

Sciences.

Fithriana, H. F. 2020. "Geostrategi Tiongkok Terkait Gerakan TIM (Turkestan Islamic Movement) di Xinjiang Pada Periode 2011-2019." *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy, Vol 4, No 2.*

Gros, Albert C. 1995. *Americas Longest War Rethinking Ourtragic Crusade Againsts Drugs.* New York: New York Press.

Hamilton, Lee. 2004. *How Congress Works and Why You Should Care .* Indiana University Press.

Harris, Johnathan. 1991. *Drugged America.* New York: Four Winds Press.

Haugaard, Lisa, Adam Isacson, Joy Olson. 2005. "Erasing the Lines: Trends in US Military Programs with Latin America." *Washington DC : Center for International Policy* 47.

Hayes, A. 2019. *who are the Uyghurs and why is the Chinese government detaining them.* <https://theconversation.com/amp/explainer-who-are-the-uyghurs-and-why-is-the-chinese-government-detaining-them-111843> .

Hendrix, Steve. 2008. "The Merida Initiative for Mexico and Central America : The New Paradigm for Security Cooperation, Attacking Organized Crime, Corruption and Violence." *Loyola University Chicago International Law Review, Vol.5, issue 2* 108.

Hidayat, Muhammad Nizar. 2013. "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina." *Interdependence Jurnal* P 165-166.

Hollingsed. 2019. *The Drug War in America: How Much Damage.* United State of America: Georgia Southern University.

House, White. 2009. *National Drug Control Strategy.* United State of America: The

White House. <http://www.whitehouse.gov/ondcp/2013-national-drug-control-strategy>.

Husnah, W. 2016. "Efek Kebijakan satu anak terhadap kehidupan perempuan di Tiongkok: Sebuah Ironi." *Jurnal kajian wilayah* 146-150.

Indonesia, CNN. 2018. *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*. Jakarta: CNN Indonesia.

Indonesia, BBC News. 2020. *Muslim Uighur: China sebut jutaan warga Xinjiang ikut program "pendidikan vokasi", AS samakan dengan kamp konsentrasi*. BBC NEWS.

Issacson, Adam. 2005. "Failing Grades:Evaluating the Result of Plan Colombia." *Yale Journal of International Affairs* 143.

2018. *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*. Jakarta: CNN Indonesia.

2018. *Jejak Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China*. Jakarta: CNN Indonesia.

Jensen, L. 1987. *Menjelaskan Politik Luar Negeri*. . Amerika : Prentice Hall Inc.

2017. *Kebijakan Politik Minoritas Islam di Tiongkok (Bagian 1)*. 3 14.

<http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/kebijakan-politik-minoritas-islam-di-tiongkok-bagian-1.html>.

n.d. *Language and Securitization of Language Policy in Contemporary Xinjiang*.

Accessed 7 28, 2022.

https://www.chinacentre.ox.ac.uk/am_event/language-and-securitization-of-language-policy-in-contemporary-xinjiang/.

Laylia, S. N. 2018. "Respon Turki terhadap Pelanggaran Ham Minoritas Muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok 2009-2010." *Jom Fisip*, Vol 5 No 1.

- Lee, Joyce. 2014. *Expressing the Chinese Dream*. 3 28. Accessed 7 26, 2022.
<https://thediplomat.com/2014/03/expressing-the-chinese-dream/>.
- Lopez, German. 2017. *How Obama quietly reshaped America's war on drugs*.
 January 19. <https://www.vox.com/identities/2016/12/19/13903532/obama-war-on-drugs-legacy>.
- Maizland, L. 2021. "China/s Repressions of Uyghurs in Xinjiang." *Council on Foreign Relations*.
- Manning, Jennifer E. 2010. *Membership of the 111th Congress: A Profile*.
 Congressional Research Service.
- Mark Webber, Michael Smith. 2002. *Foreign Policy In A Transformed World*.
 London: Routledge.
- McCarthy, D. 2011. *The Kolombian Drug Cartel*", In *The Economic History of Organized Crime*. New York: Routledge.
- McFarlane, John. 2001. *Transnational Crime and the Asia Pacific*. London:
 Rowman & Littlefield Publisher.
- Meancilla, F. 2020. "Kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap Konflik Uighur dan Han: Studi Kasus Konflik di Tiongkok. ." *Journal of International Relations. Volume 6, Nomor 2*.
- Miles, H. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles, Huberman. 2014. *Aanalisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
2006. *Ministry of Public Security Urges Use of "Strike Hard" to Counter Social Unrest*. 5 22. Accessed 7 26, 2022.

<https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/ministry-of-public-security-urges-use-of-strike-hard-to-counter>.

2020. *Muslim Uighur: China sebut jutaan warga Xinjiang ikut program "pendidikan vokasi", AS samakan dengan kamp konsentrasi*. BBC News Indonesia.

2020. *Muslim Uighur: China sebut jutaan warga Xinjiang ikut program "pendidikan vokasi", AS samakan dengan kamp konsentrasi*. BBC News Indonesia.

News, BBC. 2020. *Uighur: China paksa perempuan Uighur pasang alat kontrasepsi untuk menekan populasi, ungkap penelitian*. BBC News Indonesia.

Nufus, H. 2014. *Impian Tiongkok: Nasionalisme Tiongkok melintas batas dalam Pembangunan Tiongkok*. Jakarta: Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No 2.

Peterson, D. 2021. *how china harnesses data fusion to make sense of surveillance data*. September 23. <https://www.brookings.edu/techstream/how-china-harnesses-data-fusion-to-make-sense-of-surveillance-data/>.

Purba, R. C. 2020. "Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Di Tengah Tekanan Internasional." *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 4.

Rahma, A. 2020. Retrieved from Rumus..co.id: <https://rumus.co.id/deskriptif-adalah>. Augustus 12. <https://rumus.co.id/deskriptif-adalah>.

Rhodes, William. 1988-1993. *What America's User Spend on Illegal Drugs, 1988-1993*, 'prepared for the Office of National Drug Control Policy. Cambridge:

AbtAssociates.

Richard, L. Berke. 1989. *No Change in Basics*. New York: New York Time.

Rosyidin, M. 2015. *The Power of Idea: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saragih, Muhammad Fajrin. 2016. "Tinjauan yuridis Pelanggaran Ham terhadap Muslim Uighur di China ditinjau dari Hukum Humaniter."

Sari, Dira Permata. 2016. "Pengaruh Perubahan Orientasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Dan Produksi Narkoba Di Kolombia Melalui Plan Colombia Tahun 2000 – 2005." *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3* 32.

Shan, Weijian. n.d. *Xinjiang: what the West doesn't tell you about China's war on terror*. Accessed 7 25, 2022.
<https://www.mfa.gov.cn/ce/cgct/eng/gdxw/t1870194.htm>.

Sinaga, M. 2021. "Ketegangan Etnis di China: Konflik Xinjiang Dalam Perspektif Konstruktivisme." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.

Sorensen, R. J. 2013. *Pengantar Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL, Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

State, U.S Departement of. 2021. *U.S. Relations With Colombia*. July 19.
<https://www.state.gov/u-s-relations-with-colombia/#:~:text=Bilateral%20Economic%20Relations&text=The%20United%20States%20is%20Colombia's,totaling%20%2429.9%20billion%20in%202020>.

Su, N. H. Xin. 2020. *The Value of Xinjiang Class Education to Ethnic Minority Students, Their Families and Community: A Capability Approach*. The

Qualitative Report, Volume 25, Number 10, Article 5.

Su, Xin. 2020. "The Value of Xinjiang Class Education to Ethnic Minority Students, Their Families and Community: A Capability Approach." *The Qualitative Report*.

Sudworth, John. 2018. *Investigasi BBC: Cina dirikan kamp-kamp rahasia untuk 'mendidik' umat Muslim Uighur di Xinjiang*. BBC News Indonesia.

2018. *The First International Seminar & Roundtable Meeting "Professional Chinese Teaching" in Southeast Asia*. Accessed 7 28, 2022. <https://china.uai.ac.id/seminar/>.

Times, Global. 2021. *1-billion-ton oil and gas field discovered in Xinjiang's Tarim Basin*. 06 19. Accessed 7 25, 2022. <https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226540.shtml>.

Treaster, Joseph B. 1992. *20 Years of War on Drugs, and No Victory Yet*. New York: New York Times.

Treaster, Joseph B. 1992. *Four Years of Bush's Drug War: New Funds but an Old Strategy*. New York : New York Times.

Tursun, N. 2008. "The Formation of Modern Uyghur Historiography and Competing Perspective toward Uyghur History." *The China and Eurasia Forum Quarterly, Vol 6, No 3*.

UNESCO, World Heritage Convention. n.d. *Xinjiang Tianshan*. Accessed 07 25, 2022. <https://whc.unesco.org/en/list/1414/>.

2019. *United Nations Office on Drugs and Crime*. January 15. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html>.

W. D. Coplin, M. Marbun. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah*

- Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Wardhani, B. L. 2011. "Respon Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Volume 24 No 4.
2014. *Warga Uighur Didorong Belajar Bahasa Mandarin*. Report, CNN Indonesia.
- Weintraub, Bernard. 1989. *President Offers Strategy for United States on Drug Control*. New York: New York Times.
- White, P. T. 1989. *Coca an ancient herb turns deadly*. National Geographic.
- White, P. T. 1985. *The poppy for good and evil*. National Geographic.
- William D Coplin, M Marbun. 1992. *Pengantar politik internasional : suatu telaah teoretis*. Bandung: Sinar Baru.
- n.d. *World Uyghur Congress*. Accessed 7 28, 2022.
<https://www.uyghurcongress.org/en/activities-overview/>.
- Xu, Beina. 2014. *South China Sea Tensions*. 5 14. Accessed 7 2022, 26.
<https://www.cfr.org/backgrounder/south-china-sea-tensions>.
- Yang, Xu. 2016. *Language Policy and Language Education in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region: An Investigation of Uyghur Students' Language Learning Motivation and Attitude*. 9 27. Accessed 7 28, 2022.
<https://asiapacific.anu.edu.au/cap-events/2016-09-27/language-policy-and-language-education-xinjiang-uygur-autonomous-region>.
- Yulianto, Nur Achmad Budi. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.
- Zidane, A. 2020. "China's National Interest as The Main Conductor of Uighur Issues." *Jurnal Analisa Sosiologi* 283-293.